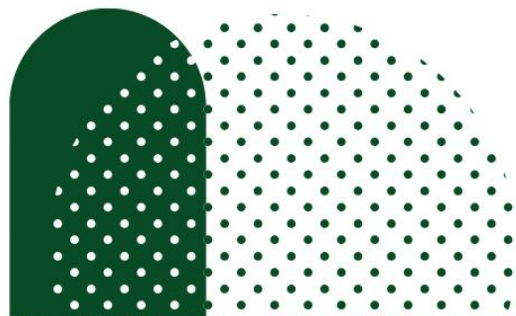


2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DIY

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta
Telp. : (0274) 562811; Fax : (0274) 564544
Surel : bpka@jogjaprovo.go.id
Laman : bpka.jogjaprovo.go.id

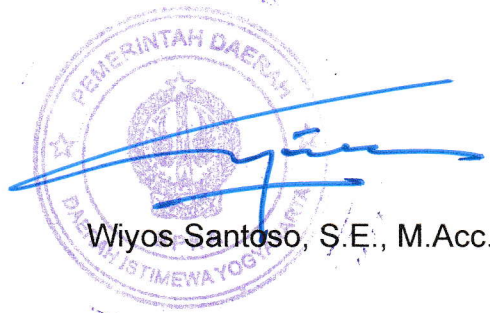


Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022 – 2027 dan Dokumen Penyelarasan Kinerja. Proses penyusunan laporan ini memperhatikan prinsip responsif gender dan inklusi sosial serta membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal Maret 2026
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset



Wiyos Santoso, S.E., M.Acc.

Ikhtisar Eksekutif

Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian tujuan Terwujudnya Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel:

Diukur dengan indikator Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel (Secara kualitatif capaian kinerja sebesar 100% dengan formulasi perhitungan: Transparan(50%): Keterlibatan dan aksesibilitas publik dalam proses pengelolaan keuangan (Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (1)) Indikator Transparan dihitung dari IPKD DIY secara kualitatif dari total IPKD, Akuntabel(50%): Dapat dipertanggungjawabkan (Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (5)) Indikator Akuntabel dihitung secara kualitatif dari Opini BPK terhadap LKPD Pemda DIY).

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Sasaran, yakni 1) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah; 2) Optimalisasi Aset Pemda DIY dan 3) Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah.
- Target capaian indikator tujuan Tahun 2025 sebesar 100% sampai dengan akhir Desember 2025 terealisasi 100%, dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikali 100%) mencapai 100%.
- Dibandingkan dengan capaian indikator tujuan tahun 2024 sebesar 100%, tercapai (target maksimal).

2. Capaian sasaran strategis 1 “Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”:

Diukur dengan indikator Persentase Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. (Secara kualitatif capaian kinerja sebesar 100% yang berasal dari masing-masing bobot perhitungan sebagai berikut : a. Optimalisasi PAD (20%) (Optimalisasi PAD dilihat dengan membandingkan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun n), b. APBD yang tepat dan akurat (20%) (APBD yang tepat dan akurat diketahui dari ketepatan waktu penyusunan APBD Murni dan APBD Perubahan sesuai dengan tatakala waktu

dan akurasi dilihat dari konsistensi antara program, kegiatan dan sub kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen RAPBD), c. Laporan keuangan daerah yang akuntabel (20%) (Laporan keuangan daerah yang akuntabel diukur dengan melihat kelengkapan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) berdasarkan PP.71/2010 dan ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 agar dapat diaudit untuk memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI). d. Penatausahaan Keuangan daerah yang akurat (20%) (Penatausahaan Keuangan daerah yang akurat untuk mengetahui tingkat akurasi antar dokumen penatausahaan yang diterbitkan dengan membandingkan antara dokumen SP2D dengan dokumen SPM), e. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (20%). (Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten diukur dari upaya yang telah dilakukan untuk melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten/kota se-DIY, BUMD dan BUKP serta penyusunan regulasi keuangan daerah).

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Target capaian indikator sasaran Tahun 2025 sebesar 100%; sampai dengan akhir bulan Desember 2025 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 100%, tetap (target maksimal).
3. Capaian sasaran strategis 2 “Optimalisasi Aset Pemda DIY”:

Diukur dengan indikator nilai rupiah proyeksi Optimalisasi Aset-aset Pengelola Barang Milik Daerah. (Nilai rupiah optimalisasi barang milik daerah . diperoleh dari realisasi proyeksi barang milik daerah pada pengelola: 1. Retribusi rumah dinas, tanah dan bangunan, 2. Penjualan Barang Milik Daerah, 3. Sewa Tanah dan Bangunan, 4. Hasil Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Sampai dengan akhir Desember 2025 realisasi tercapai Rp14.924.078.018,- dari proyeksi Rp14.213.383.619,- dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 105,00% melampaui target kinerja hasil penyelarasan kinerja.
 - Dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp16.042.037.288,- terdapat penurunan sebesar Rp1.117.959.270,- atau 6,97%.
 - Capaian target indikator pada Tahun 2025 terhadap target 2027 adalah 100,87%.
4. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah”:
- Diukur dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan :
1. Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah,
 2. Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 A(95), Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY telah melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori A (95,50).
 - Tercapai 95,50%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100,53%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY ke depan, sebagai berikut :

1. Era revolusi industri dan era society 5.0 serta kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di segala bidang termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik secara SMART;
2. Optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah untuk menunjang peningkatan pendapatan asli daerah dengan menyesuaikan penilaian barang milik daerah atas kondisi perekonomian maupun penilaian untuk pemanfaatan aset.
3. Penyelenggaraan fungsi penunjang bidang keuangan sebagai pendukung terwujudnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang baik .

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi	6
Daftar Tabel	7
Daftar Gambar	9
BAB I Pendahuluan	10
1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	10
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	12
1.3 Isu-Isu Strategis	14
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	16
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	19
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	21
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	21
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	22
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	24
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	27
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	32
BAB III Akuntabilitas Kinerja	34
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025.....	34
3.2 Capaian Kinerja Lainnya	72
3.3 Analisis Efisiensi Anggaran	76
3.4 Inovasi	77
3.5 Lintas Sektor.....	78
BAB IV Penutup	85
4.1. Kesimpulan.....	85
4.2. Langkah Perbaikan Kinerja.....	86
LAMPIRAN	87

Daftar Tabel

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	16
Tabel I. 2 Sarana-Prasarana	17
Tabel I. 3 Anggaran Tahun 2025.....	18
Tabel I. 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.....	19
Tabel II. 1 Tujuan dan Sasaran Srategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 2022-2027	22
Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan	22
Tabel II. 3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025	24
Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Tujuan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2025.....	28
Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Sasaran Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2025.....	28
Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tujuan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2025	29
Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2025	30
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	34
Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025	34
Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	38
Tabel III. 4 Transparansi dan Akuntabel Pengelolaan Keuangan dan Aset.....	39
Tabel III. 5 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025.....	40
Tabel III. 6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	43
Tabel III. 7 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025.....	44
Tabel III. 8 Penetapan APBD	45
Tabel III. 9 Program kegiatan dalam RAPBD TA.2026	45
Tabel III. 10 Kesesuaian dan Ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemda DIY	46
Tabel III. 11 Realisasi SP2D dan SPM Tahun 2025.....	47
Tabel III. 12 Kinerja Evaluasi APBD, Pembinaan Pengelola Keuangan dan Optimalisasi BUMD	48
Tabel III. 13 Pengukuran Capaian Sasaran 1	48

Tabel III. 14 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran	51
Tabel III. 15 Realisasi Roa pada BUMD DIY.....	57
Tabel III. 16 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	58
Tabel III. 17 Realisasi Optimalisasi Barang Milik Daerah Tahun 2025	59
Tabel III. 18 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	59
Tabel III. 19 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran	60
Tabel III. 20 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	62
Tabel III. 21 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025.....	63
Tabel III. 22 Kategori Hasil Evaluasi RB Tahun 2024 berdasar PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi	65
Tabel III. 23 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	67
Tabel III. 24 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3	68
Tabel III. 25 Kontribusi Tujuan dan Sasaran BPKA DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah.....	75
Tabel III. 26 Kontribusi Program BPKA DIY terhadap Capaian Program Pemda.....	76
Tabel III. 27 Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran Belanja dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025.....	77
Tabel III. 28 Inventarisasi Lintas Sektor Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	78

Daftar Gambar

Gambar I. 1 <i>Cascading Kinerja</i> Penyelarasan	11
Gambar I. 2 Struktur Organisasi.....	12
Gambar I. 3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	13
Gambar II. 1 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	32
Gambar II. 2 Aplikasi RKBMD	33
Gambar II. 3 Aplikasi SIM Persediaan	33
Gambar II. 1 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	32
Gambar II. 2 Aplikasi RKBMD	33
Gambar II. 3 Aplikasi SIM Persediaan	33

BAB I Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

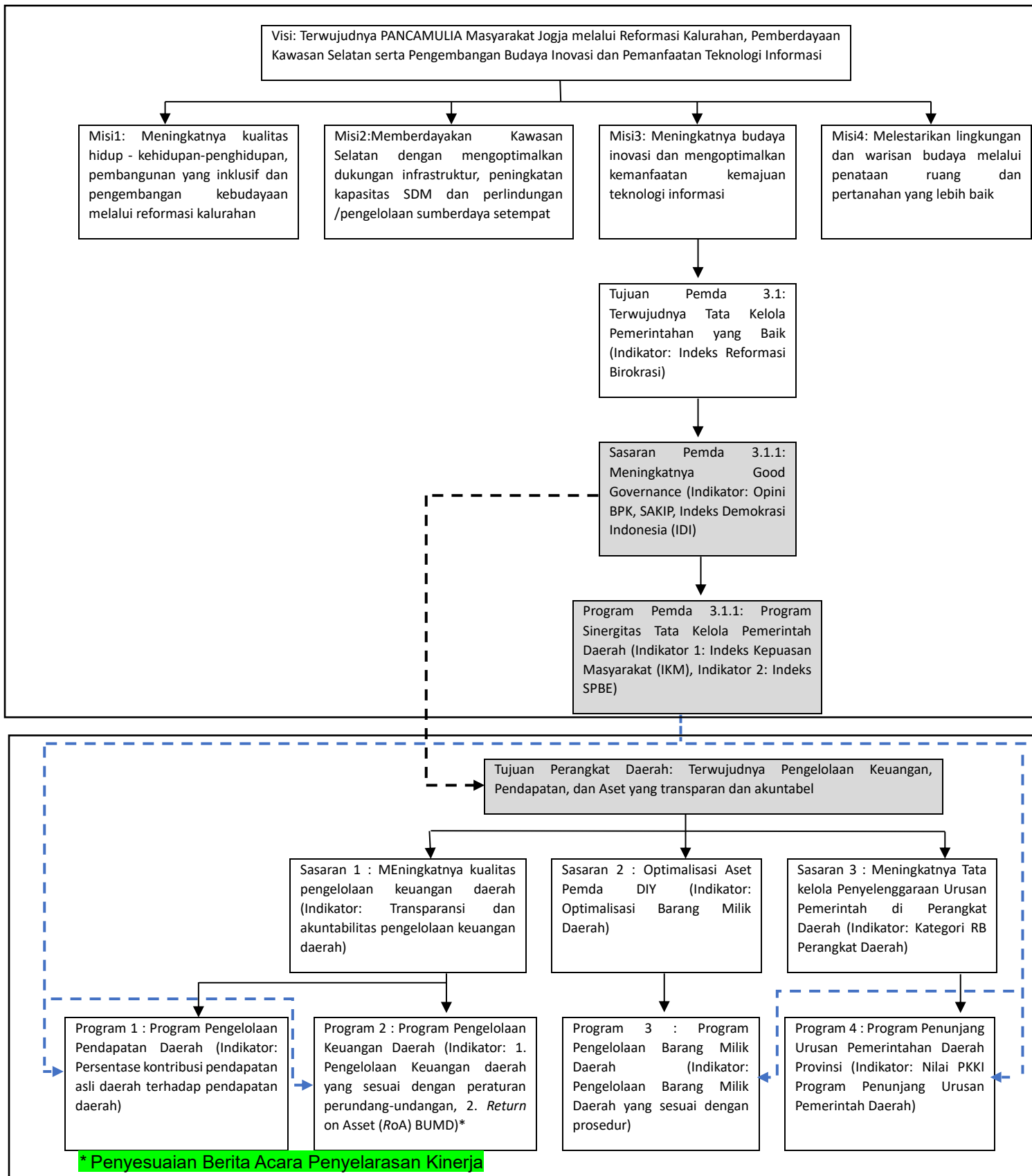
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

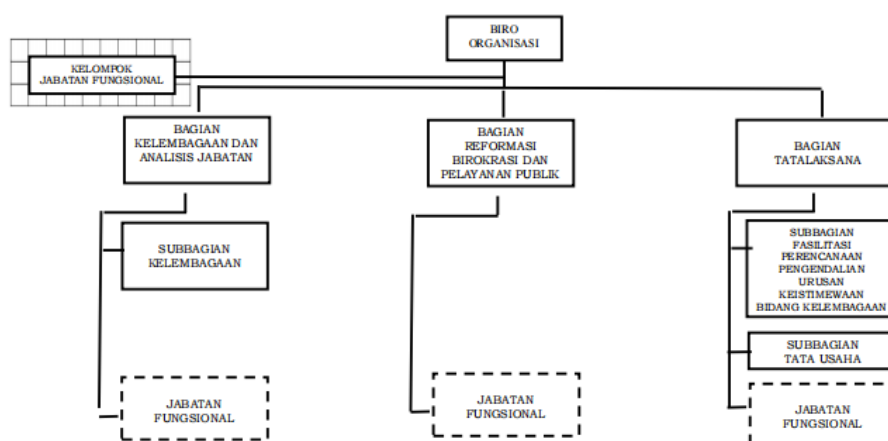
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2027. Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

Gambar I. 1 Cascading Kinerja Penyelarasan

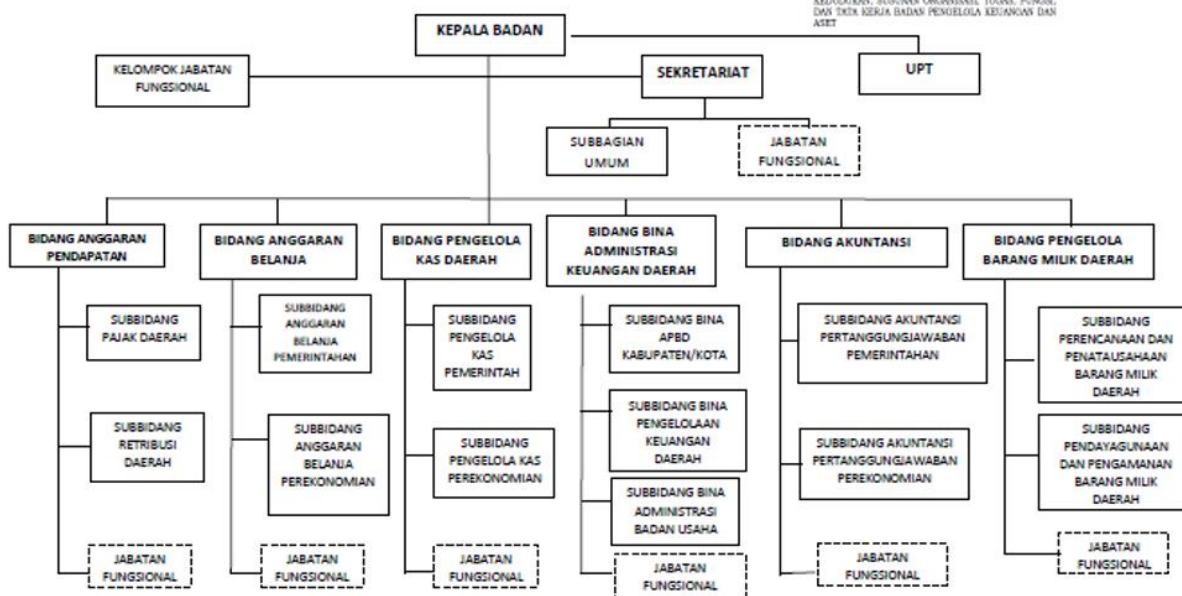


Sumber: RJMPD 2022-2027, Renstra BPKA DIY 2022-2027

Gambar I. 2 Struktur Organisasi



LAMPIRAN PERATURAN GOVERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET



Sumber: Lampiran PERGUB DIY Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD DIY 2022-2027, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut :

Gambar I. 3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Adapun fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Badan ;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi, dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta barang milik daerah;
- c. pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain, serta pendapatan transfer;
- d. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. pengelolaan kas daerah dan akuntansi;
- h. pengelolaan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan dan tuntutan ganti rugi;
- j. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
- k. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- n. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan/atau pengawasan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Sesuai pelaksanaan tugas fungsi BPKA dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana dengan komposisi sebagai berikut :

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan 2. Sekretaris: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbagian Umum 2) Subkoordinator Program 3) Subkoordinator Keuangan 3. Kepala Bidang Anggaran Pendapatan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbidang Pajak Daerah 2) Kasubbidang Retribusi Daerah; 3) Subkoordinator Pendapatan Lain-lain dan Dana Transfer 4. Kepala Bidang Anggaran Belanja: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbidang Anggaran Belanja Pemerintahan 2) Kasubbidang Anggaran Belanja Perekonomian 3) Subkoordinator Anggaran Belanja Fisik dan Sarpras 4) Subkoordinator Anggaran Belanja Sosial Budaya 5. Kepala Bidang Pengelola Kas Daerah: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbidang Pengelola Kas Pemerintahan 2) Kasubbidang Pengelola Kas Perekonomian 3) Subkoordinator Pengelola Kas Fisik dan Sarpras; dan 4) Subkoordinator Pengelola Kas Sektor Sosial Budaya. 6. Kepala Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbidang Bina APBD Kab/Kota 2) Kasubbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah 3) Kasubbidang Bina Administrasi BUMD 7. Kepala Bidang Akuntansi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan 2) Kasubbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian 3) Subkoordinator Akuntansi Pertanggungjawaban Fisik dan Sarpras 4) Subkoordinator Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Budaya 8. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah 2) Kasubbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Mllik Daerah 3) Subkoordinator Monitoring dan Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibawah koordinasi Subkoordinator Program: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 2) Analisis Sistem Informasi 2. Dibawah koordinasi Subkoordinator Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bendahara 2) Pengadministrasi Keuangan 3) Pengelola Gaji 4) Pengelola Akuntansi 5) Verifikasi Data Laporan Keuangan 3. Dibawah Kasubaggian Umum: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum; 2) Pengadministrasi Persuratan 3) Pranana Kearsipan 4) Analis SDM Aparatur 5) Teknisi Sarana dan Prasarana 6) Kustodian Barang Milik Negara; 7) Pengemudi 4. Dibawah Kasubbidang Pajak Daerah: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Pajak Daerah 5. Dibawah Kasubbidang Retribusi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Retribusi Daerah 2) Analis Pendapatan Daerah 6. Dibawah Kasubbidang Anggaran Belanja Pemerintahan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Perencanaan Anggaran 7. Dibawah Kasubbidang Anggaran Belanja Perekonomian: <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Perencanaan Anggaran 8. Dibawah Kasubbidang Pengelola Kas Pemerintahan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis perbendaharaan 9. Dibawah Kasubbid Pengelola Kas Perekonomian: <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis perbendaharaan 10. Dibawah Kasubbidang Bina APBD Kab/Kota: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Pengelolaan keuangan 11. Dibawah Kasubbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah: <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Pengelolaan keuangan 12. Dibawah Kasubbidang Bina Administrasi BUMD: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengevaluasi Perkembangan BUMD 13. Dibawah Kasubbid Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Penyusun laporan Keuangan 14. Dibawah Kasubbid Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusun laporan keuangan 15. Dibawah Kasubbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Pengelolaan Kekayaan Daerah 16. Dibawah Kasubbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah: <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Pengelolaan Kekayaan Daerah 2) Analis Aset Daerah

1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagai institusi yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset, isu strategis yang melingkupi adalah sebagai berikut :

1. Birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Terwujudnya birokrasi pemerintah yang bersih dan akuntabel adalah tuntutan dan harapan masyarakat, karena berkaitan erat dengan bagaimana pentingnya membangun system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari aspek perencanaan, penganggaran, penetapan dan pelaksanaan kinerja, monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja. Aspek-aspek di atas harus dapat dipertanggungjawabkan dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tanggungjawab melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan secara efektif dan efisien dalam pembelanjaan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pengelolaan keuangan dan pembelanjaan anggaran harus dimanfaatkan untuk pembangunan yang dirasakan oleh lapisan masyarakat.

3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Isu akuntabilitas menekankan pentingnya membangun sistem akuntabilitas aparatur, baik menyangkut perencanaan program/kegiatan, penganggaran, penetapan kinerja, pengorganisasian, penatausahaan, monitoring, pengendalian maupun pelaporannya.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada							Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi						L	P
1	2	3	4					5	6						7	8
			S2	S1	D3	SM A		S2	S1	D3	SM A	SM P	SD			
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1					1	1						1	
B.	Jabatan Administrasi															
	1. Administrator	12	12					11	8	3					3	8
	2. Pengawas	29		29				28	17	11					16	12
	3. Pelaksana	375		188	181	6		162	15	65	44	34	2	2	86	76
C.	Jabatan Fungsional	12		12				8	4	4					3	5
	Jumlah	429	13	229	181	6		210	45	83	44	34	2	2	109	101

Update data 31 Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan Strata-1 sebanyak 83 orang (39,52%), disusul oleh jenjang Pendidikan Strata-2 sebanyak 45 orang (21,42%), Diploma-3 sebanyak 44 orang (20,95%), SMA sebanyak 34 orang (16,19%), SLTP/setingkat sebanyak 2 orang (0,95%) dan pendidikan SD sebanyak 2 orang (0,95%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibandingkan pegawai laki-laki; sedangkan untuk jabatan struktural hampir sama dijabat perempuan dan laki-laki, namun untuk fungsional lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan keadilan dan kesetaraan gender dalam manajemen sumber daya aparatur .

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 219 orang pada jabatan, terdiri dari 1 (satu) orang jabatan administrasi administrator, 1 (satu) orang jabatan administrasi pengawas, 213 orang jabatan administrasi pelaksana dan 4 orang jabatan fungsional. Terdapat 4 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, namun dengan kebijakan menambah C-ASN pada tahun selanjutnya dan pengangkatan tenaga bantu (PPPK DIY) menjadi PPPK-ASN dianggap cukup dalam menunjang kinerja organisasi.

Tabel I. 2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	ASET TETAP		
1	Tanah	17 bidang	62.978.918.190,00
2	Alat Besar	63 unit	12.269.634.699,00
3	Alat Angkutan	68 unit	6.961.440.240,00
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	29 unit	161.669.925,00
5	Alat Pertanian	21 unit	54.513.000,00
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.177 unit	43.864.461.222,41
7	Alat studio, Komunikasi dan Pemancar	741 unit	5.230.619.807,14
8	Alat kedokteran dan kesehatan	40 unit	61.929.997,00
9	Alat Laboratorium	117 unit	1.090.210.000,00
10	Alat Persenjataan	3 unit	21.000.000,00
11	Komputer	1.933 unit	20.531.791.503,85
12	Alat Eksplorasi	1 unit	3.000.000,00
13	Alat Keselamatan Kerja	1 unit	34.288.000,00
14	Rambu-Rambu	48 unit	25.952.000,00
15	Peralatan Olah Raga	8 unit	99.095.000,00
16	Bangunan gedung	71 unit	156.156.711.969,00
17	Tugu Titik Kontrol/Pasti	5 unit	1.989.929.092,00
18	Jalan dan Jembatan	1 unit	106.000.000,00
19	Bangunan Air	14 unit	1.708.177.900,00
20	Instalasi	17 unit	587.574.250,00
21	Jaringan	12 unit	3.316.227.700,00
21	Bahan Perpustakaan	2.477 unit	216.950.690,00
22	Barang bercorak kesenian / kebudayaan/ olahraga	12 unit	2.600.000,00
23	Tanaman	1 unit	14.850.000,00
24	Konstruksi dalam Pengerjaan	3 unit	401.317.200,00
	ASET LAINNYA		
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1 unit	39.440.000,00
2	Aset Tidak Berwujud	122 unit	5.336.363.345,00
3	Aset Lain-lain	5 unit	182.104.435,00
	Jumlah		323.146.770.165,40

Sumber Data: Neraca Aset BPKA per 31 Desember 2025 (Unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di Tahun 2025

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 4 (empat) unit kendaraan dinas bermotor perorangan, 24 (dua puluh empat) unit kendaraan bermotor penumpang, 2 (dua) unit kendaraan bermotor barang dan 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan roda dua untuk operasional. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana Tahun 2025 mencapai ideal. Namun dilihat secara kualitatif masih perlu perbaikan maupun *upgrading*. Untuk mengikuti dinamika penambahan pegawai, akan dilakukan inventarisasi tambahan sarana prasarana untuk menunjang kinerja.

Tabel I. 3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH	4.941.624.656.991	4.673.910.526.944	(267.714.130.047)
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.624.355.794.360	1.647.328.718.022	22.972.923.662
4	1	01	Pajak Daerah	1.462.082.788.059	1.464.214.571.759	2.131.783.700
4	1	02	Retribusi Daerah	908.619.875	1.026.953.883	118.334.008
	1	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	123.993.797.426	126.006.483.045	2.012.685.619
4	1	04	Lain-lain PAD Yang Sah	37.370.589.000	56.080.709.335	18.710.120.335
4	2		PENDAPATAN TRANSFER	3.309.663.362.631	3.018.976.308.922	(290.687.053.709)
4	2	01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.308.682.436.000	3.017.995.382.291	(290.687.053.709)
4	2	02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	980.926.631	980.926.631	0
4	3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.605.500.000	7.605.500.000	0
4	3	01	Pendapatan Hibah	7.605.500.000	7.605.500.000	0
Jumlah Pendapatan				4.941.624.656.991	4.673.910.526.944	(267.714.130.047)
5			BELANJA DAERAH	1.016.082.490.288	974.927.919.180	(41.154.571.108)
5	1		BELANJA OPERASI	104.072.509.782	98.955.212.834	(5.117.296.948)
5	1	01	Belanja Pegawai	76.132.541.982	72.339.709.234	(3.792.833.748)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.939.967.800	24.159.402.920	(1.467.033.056)
5	2		BELANJA MODAL	486.625.000	1.038.599.523	551.974.523
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	486.625.000	650.795.860	164.170.860
5	2	03	Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	387.803.663	387.803.663
5	3		BELANJA TIDAK TERDUGA	31.760.589.370	23.379.169.670	(8.381.419.700)
5	3	01	Belanja Tidak Terduga	31.760.589.370	23.379.169.670	(8.381.419.700)
5	4		BELANJA TRANSFER	879.762.766.136	852.489.676.753	(27.273.089.383)
5	4	01	Belanja Bagi Hasil	437.204.710.166	511.885.255.925	74.680.545.759

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	442.558.055.970	340.604.420.828	(101.953.635.142)
	Jumlah Belanja	1.016.082.490.288	974.927.919.180	(41.154.571.108)
	Total Surplus/(Defisit)	3.925.542.166.703	3.698.982.607.764	(226.559.558.939)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	105.542.000.000	155.542.000.000	50.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000	5.000.000.000	2.500.000.000
	Pembiayaan Neto	103.042.000.000	150.542.000.000	47.500.000.000

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPKA Tahun 2025, diolah

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY semula Rp 1.016.082.490.288,- dan mengalami perubahan menjadi Rp 974.927.919.180,- atau berkurang Rp (41.154.571.108). Perubahan anggaran Tahun 2025 merupakan cerminan dukungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dalam bentuk *Refocusing* dan realokasi anggaran.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tabel I. 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Perencanaan Kinerja guna memastikan bahwa setiap meta indicator kinerja telah dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan yang jelas;	1. Berkomitmen melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Perencanaan Kinerja guna memastikan bahwa setiap meta indicator kinerja telah dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan yang jelas
2.	Meningkatkan pengendalian terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja menampilkan informasi yang akurat mengenai pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.	2. Berkomitmen meningkatkan pengendalian terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja menampilkan informasi yang akurat mengenai pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
3.	Meningkatkan keselarasan penyampaian laporan kinerja pada aplikasi Sengguh dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani.	3. Berkomitmen meningkatkan keselarasan penyampaian laporan kinerja pada aplikasi Sengguh dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II berisi:

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Tahun 2025 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan baik melalui mekanisme Penyelarasan Kinerja maupun perubahan APBD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyelarasan Kinerja di Pemerintah Daerah DIY dilaksanakan sebagai upaya integrasi dengan arah kebijakan pembangunan nasional, sekaligus mereviu capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah melampaui target guna mendorong penetapan target yang lebih menantang dan berdampak pada periode berikutnya. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan Dokumen Penyelarasan Kinerja.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY selama lima tahun adalah:

“Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel”

Adapun tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dalam waktu lima tahun yang telah diselaraskan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel II. 1 Tujuan dan Sasaran Srategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 2022-2027

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal (Baseline 2022)	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Periode/Rencana
					2023	2024	2025*	2026*	2027*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Pengelolaan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	%	100	100	100	100*	100*	100*	100*
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100	100	100	100*	100*	100*	100*
2.	Optimalisasi Aset Pemda DIY	Optimalisasi Barang Milik Daerah	Rupiah	15.486.233.611	9.016.589.475	9.378.609.475	14.213.383.619*	14.503.963.482*	14.795.584.771*	14.795.584.771*
3	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Indeks	A (82,73)	A (94,41)	A (94,89)	A* (95)	A* (95,20)	A* (95,50)	A* (95,50)

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Melaksanakan perencanaan penganggaran, akuntansi pelaporan keuangan, penatausahaan keuangan dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan secara akuntabel dan transparan
		2. Melakukan implementasi Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 dengan mengembangkan hubungan keuangan dan	1. Menyusun regulasi sebagai dasar hukum pemungutan pendapatan daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mempersiapkan Sistem Aplikasi Perpajakan guna mendukung pelaksanaan Opsen Pajak 3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan akses dan kenyamanan melalui peningkatan fasilitas infrastruktur 4. Penggunaan media sosial untuk sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam system pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terpadu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kepada perangkat daerah untuk melaksanakan integrasi system pengelolaan keuangan daerah
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Mengimplementasikan Permendagri 79 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan KKPD dalam Pelaksanaan APBD dan Pergub DIY No. 1 Tahun 2023 tentang tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPD untuk pelaksanaan APBD dan Instruksi Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan transaksi non tunai dengan sarana yang tersedia sesuai Instruksi Gubernur 4 Tahun 2023
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatkan kontribusi BUMD dan BUKP dalam perekonomian daerah yang bermanfaat bagi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembinaan terkait peningkatan kinerja, kapasitas dan produktifitas BUMD 2. Penguatan kelembagaan BUMD dan BUKP
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Optimalisasi Aset Pemda DIY 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata Kelola barang milik daerah dan pemanfaatan aset yang bernilai ekonomis untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penilaian potensi BMD dan Menyusun mekanisme pemanfaatan 2. Menyusun kajian komprehensif sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah 3. Identifikasi terhadap potensi-potensi optimalisasi atas barang milik daerah yang berada di OPD atau Pengguna
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, pengelolaan sumberdaya manusia dan informasi public 2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah 3. Mengoptimalkan capaian kinerja fisik dan keuangan pelaksanaan program kegiatan

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tahun 2025 dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II. 3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ Berkurang (Rp)
			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1.1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.913.860.700	5.396.269.750	117.590.250
		1.1.1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.	5.513.860.000	5.396.269.750	117.590.250
		1.1.1.1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	2.716.454.400	2.708.364.400	8.090.000
		1.1.1.2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	37.171.000	19.467.100	17.703.900
		1.1.1.3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	336.282.000	157.402.000	178.880.000
		1.1.1.4. Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	279.198.050	151.937.950	127.260.100
		1.1.1.5. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.449.935.300	2.299.768.300	150.167.000
		1.1.1.6. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	57.670.000	32.710.000	24.960.000
		1.1.1.7. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	37.149.950	26.620.000	10.529.950
		1.2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	915.041.617.806	932.373.835.072	17.332.217.266
		1.2.1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.339.205.500	1.091.794.500	1.247.411.000
		1.2.1.1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	39.231.000	34.456.000	4.775.000
		1.2.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	33.626.000	29.716.000	3.910.000
		1.2.1.3. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	728.866.000	280.766.000	448.100.000
		1.2.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.432.875.750	581.178.500	851.697.250
		1.2.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	94.981.750	80.703.000	14.278.750
		1.2.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	9.625.000	4.975.000	4.650.000
	1.2.2. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota	17.723.300	16.823.300	900.000	
	1.2.2.1. Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Kab / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	5.000.000	5.000.000	0	
	1.2.2.2. Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P APBD Kab/Kota	5.000.000	5.000.000	0	
	1.2.2.3. Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan	5.000.000	5.000.000	0	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ Berkurang (Rp)
			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
		Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
		1.2.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemda Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemda	2.723.300	1.823.300	900.000
		1.2.3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	74.766.000	70.654.000	4.112.000
		1.2.3.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	15.990.000	15.990.000	0
		1.2.3.2. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dg Instansi terkait	58.776.000	54.664.000	4.112.000
		1.2.4. Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	259.144.500	205.912.500	53.232.000
		1.2.4.1. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	8.422.600	7.972.600	450.000
		1.2.4.2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda	17.326.100	17.326.100	0
		1.2.4.3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg Pertanggung Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	51.502.000	50.342.000	1.160.000
		1.2.4.4. Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	3.524.600	3.524.600	0
		1.2.4.5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4.639.000	3.489.000	1.150.000
		1.2.4.6. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda	53.305.300	2.743.300	50.562.000
		1.2.4.7. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	8.974.900	8.974.900	0
		1.2.4.8. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	111.450.000	111.450.000	0
		1.2.5. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	912.350.778.506	930.988.650.772	18.637.872.266
		1.2.5.1. Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1.124.143.000	1.124.143.000	0
		1.2.5.2. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	342.421.123.032	342.421.123.032	0
		1.2.5.3. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	39.476.792.633	39.476.792.633	0
		1.2.5.4. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	547.966.592.107	547.966.592.107	0
		Total Anggaran yang mendukung Sasaran 1	920.955.478.506	937.770.104.822	16.814.626.316
	2. Optimalisasi Aset Pemda DIY	2.1. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.	3.709.701.900	3.709.701.900	0
		2.1.1. Pengelolaan Barang Milik Daerah.	3.709.701.900	3.709.701.900	0
		2.1.1.1. Penyusunan Standar Harga	317.064.000	317.064.000	0

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ Berkurang (Rp)
			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
		2.1.1.2. .Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	82.221.600	82.221.600	0
		2.1.1.3. Penatausahaan Barang Milik Daerah	239.897.000	239.897.000	0
		2.1.1.4. Pengamanan Barang Milik Daerah	2.386.066.800	2.366.066.800	0
		2.1.1.5. Penilaian Barang Milik Daerah	205.879.500	205.879.500	0
		2.1.1.6. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	478.573.000	478.573.000	0
		Total Anggaran yang mendukung Sasaran 2	3.709.701.900	3.709.701.900	0
	3. Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	92.291.616.882	90.090.056.989	2.201.559.893
		3.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.593.500	7.638.500	1.955.000
		3.1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.994.400	2.620.000	1.374.400
		3.1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.998.600	3.450.500	548.100
		3.1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.600.500	1.568.000	32.500
		3.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	76.208.561.482	74.127.271.316	2.081.290.166
		3.1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	76.132.541.982	74.051.251.816	2.081.290.166
		3.1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	68.020.000	68.020.000	0
		3.1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.800	4.999.800	0
		3.1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	2.999.700	2.999.700	0
		3.1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	88.200.000	73.920.000	14.280.000
		3.1.3.1. Penatausahaan BMD pada SKPD	88.200.000	73.920.000	14.280.000
		3.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.233.000	5.483.000	750.000
		3.1.4.1. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.233.000	5.483.000	750.000
		3.1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	990.620.400	916.754.350	73.866.050
		3.1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	73.600.600	83.808.400	(10.207.800)
		3.1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	232.816.000	232.257.000	559.000
		3.1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	64.826.600	64.826.600	0
		3.1.5.4. Penyediaan Logistik Kantor	46.486.000	36.431.000	10.055.000
		3.1.5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91.967.200	84.920.350	7.046.850
		3.1.5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.200.000	19.176.000	24.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ Berkurang (Rp)
			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
		3.1.5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360.718.000	222.598.000	138.120.000
		3.1.5.7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	101.006.000	172.746.000	(71.740.000)
		3.1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	399.815.000	531.539.860	(131.724.860)
		3.1.6.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	384.715.000	516.439.860	(131.724.860)
		3.1.6.3. Pengadaan Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.100.000	15.100.000	0
		3.1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.082.833.600	10.594.405.100	488.428.500
		3.1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.048.000	19.729.000	319.000
		3.1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.190.558.600	4.190.557.100	1.500
		3.1.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	402.839.000	383.207.000	19.632.000
		3.1.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.469.388.000	6.000.912.000	468.476.000
		3.1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.505.759.900	3.687.241.200	(181.481.300)
		3.1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.726.000	18.726.000	0
		3.1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.033.212.200	1.002.807.200	30.405.000
		3.1.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.302.439.000	1.302.439.000	0
		3.1.8.4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	460.185.700	672.072.000	(211.886.300)
		3.1.8.5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarpras Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	691.197.000	691.197.000	0
		Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 3	92.291.616.882	90.090.056.989	2.201.559.893

Sumber data: Dokumen DPPA BPKA Tahun 2025, diolah.

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut :

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Tujuan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2025

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
 Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel	%	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*)

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome

Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Sasaran Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2025

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
 Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100	Triwulan I	25
					Triwulan II	54
					Triwulan III	72
					Triwulan IV	100
2.	Optimalisasi aset Pemda DIY	Optimalisasi Barang Milik Daerah	Rupiah	9.703.109.475	Triwulan I	3.429.301.300
					Triwulan II	3.898.312.800
					Triwulan III	8.899.312.800
					Triwulan IV	9.703.109.475
3.	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	A (95,00)	Triwulan I	A (95,00)
					Triwulan II	A(95,00)
					Triwulan III	A(95,00)
					Triwulan IV	A(95,00)*)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 3.184.727.350,-
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)	Rp 915.041.617.806,-
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (APBD)	Rp 2.835.394.900,-
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 78.980.637.382,-
	Jumlah	Rp1.000.042.377.438,-

Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 296.671.000,-
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp2.019.832.700,-
	Jumlah	Rp2.316.503.700,-

Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 731.571.000,-
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp3.676.890.400,-
	Jumlah	Rp4.408.461.400,-

Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 416.345.500,-
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp1.873.543.200,-
	Jumlah	Rp2.289.888.700,-

Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulonprogo

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 408.894.250,-
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp2.138.912.000,-
	Jumlah	Rp2.547.806.250,-

Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 875.651.600,-
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp3.601.801.200,-
	Jumlah	Rp4.477.452.800,-

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Pada tahun 2025, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya Penyelarasan Kinerja dan perubahan anggaran kegiatan dan mutasi jabatan dengan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tujuan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2025

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan*	Triwulan	Target**
1.	Terwujudnya pengelolaan	Pengelolaan keuangan,	%	100*	Triwulan I	100
					Triwulan II	100

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan*	Triwulan	Target**
	keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel			Triwulan III	100
					Triwulan IV	100**

Keterangan:

* Target Tahunan berdasarkan Berita Acara Penyelarasan Kinerja

** Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan*	Triwulan	Target**
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100*	Triwulan I	25
					Triwulan II	54
					Triwulan III	72
					Triwulan IV	100
2.	Optimalisasi Aset Pemda DIY	Optimalisasi Barang Milik Daerah	Rupiah	14.213.383.619*	Triwulan I	3.429.301.300
					Triwulan II	3.898.312.800
					Triwulan III	8.899.312.800
					Triwulan IV	14.213.383.619
5.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	A (95,00)*	Triwulan I	A (95,00)
					Triwulan II	A (95,00)
					Triwulan III	A (95,00)
					Triwulan IV	A (95,00)**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp. 2.944.563.500,00
2.	Program Program Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)	Rp877.033.925.927,00
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (APBD)	Rp 3.709.701.900,00
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 75.140.911.484,00
	Jumlah Anggaran	Rp 960.173.350.607,00

Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 280.830.900,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp1.941.792.800,00
	Jumlah	Rp 2.222.623.700,00

Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 627.884.000,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp3.675.204.423,00
	Jumlah	Rp4.303.088.423,00

Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 281.080.500,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp1.926.235.500,00
	Jumlah	Rp2.207.316.000,00

Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulonprogo

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 397.149.250,00
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp2.096.460.000,00
	Jumlah	Rp2.493.609.250,00

Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

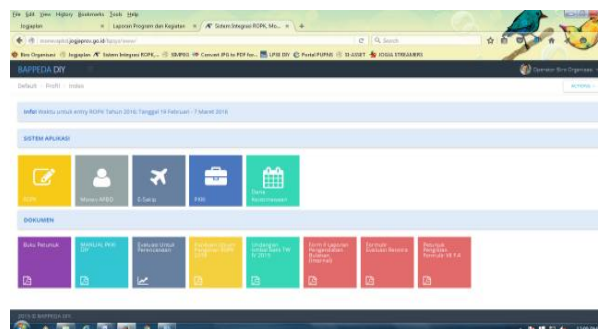
No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 864.761.600,00
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp4.462.670.800,00
	Jumlah	5.327.432.400,00

1. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.
2. *Target Tahunan berdasarkan Berita Acara Penyelarasan Kinerja
3. ** Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

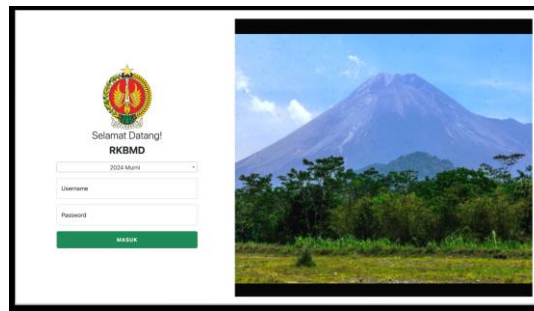
Gambar II. 1 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

2. Sistem Informasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sistem yang digunakan untuk mengkoordinasi dan mengkompilasi penyusunan RKBMD dari masing-masing OPD dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi serta ketersediaan barang daerah yang ada sehingga dapat menghasilkan laporan output penetapan RKBMD yang lebih terukur, sistematis dan terkompilasi dengan baik serta akurat..

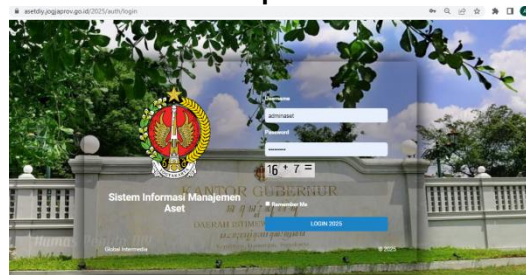
Gambar II. 2 Aplikasi RKBMD



Sumber : www.rkbmdiy.jogjaprov.go.id

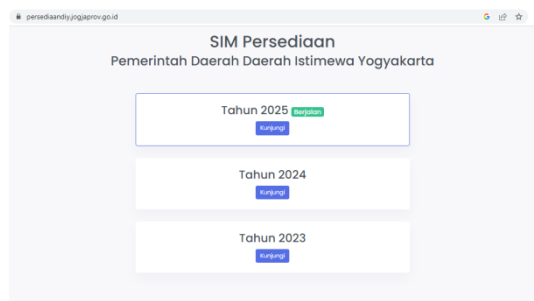
3. Sistem Informasi Manajemen Aset adalah sebuah platform digital untuk mengelola inventaris barang milik daerah (tanah, gedung, kendaraan, dll.) secara terintegrasi, memungkinkan pencatatan, penilaian, pemeliharaan, hingga penghapusan aset secara efisien.

Gambar II.3. Aplikasi SIM Aset



4. Sistem Informasi Manajemen Aset adalah sebuah platform digital untuk mengelola inventaris barang milik daerah (tanah, gedung, kendaraan, dll.) secara terintegrasi, memungkinkan pencatatan, penilaian, pemeliharaan, hingga penghapusan aset secara efisien.

Gambar II. 3 Aplikasi SIM Persediaan



BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab III berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2025
2. Capaian Kinerja Lainnya
3. Efisiensi Anggaran
4. Inovasi
5. Lintas Sektor

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dengan Bapak Gubernur DIY di tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR/ PENJELASAN META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	REALI- SASI 2024	TAHUN 2025				TARGE T AKHIR PERIO DE*/RP JMD/R ENSTR A
						TARGET*	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel	Indikator: Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset yang transparan dan akuntabel Meta Indikator: Transparan: Keterlibatan dan aksesibilitas publik dalam proses pengelolaan keuangan (Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (1)) Akuntabel: Dapat dipertanggungjawabkan (Permendagri 86 tahun	%	100	100	100*	100% (50%+50%) (transparan 50% dan akuntabel 50%)	100% (100/100) x 100%	Sangat Baik	100

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR/ PENJELASAN META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	REALI- SASI 2024	TAHUN 2025				TARGE T AKHIR PERIO DE*/RP JMD/R ENSTR A
						TARGET*	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<p>2017 Pasal 6 (5))</p> <p>Penjelasan Detail Meta Indikator Secara kualitatif capaian kinerja sebesar 100% dengan formulasi perhitungan:</p> <p>Transparan(50%): Keterlibatan dan aksesibilitas publik dalam proses pengelolaan keuangan (Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (1)) Indikator Transparan dihitung dari IPKD DIY secara kualitatif dari total IPKD</p> <p>Akuntabel(50%): Dapat dipertanggungjawabkan (Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (5)) Indikator Akuntabel dihitung secara kualitatif dari Opini BPK terhadap LKPD Pemda DIY</p>								
B.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	<p>Indikator: Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah</p> <p>Meta Indikator: Secara kualitatif capaian kinerja sebesar 100% dengan formulasi perhitungan:</p> <p>1.Meningkatnya PAD (bobot 20%) 2. APBD yang tepat waktu dan akurat (bobot 20%) 3.Laporan keuangan daerah yang akuntabel (bobot 20%) 4.Penatausahaan keuangan daerah yang akurat (bobot 20%) 5.Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (bobot 20%)</p> <p>Penjelasan Detail Meta Indikator Secara kualitatif capaian kinerja sebesar 100% yang berasal dari masing-masing bobot perhitungan sebagai berikut :</p> <p>a. Optimalisasi PAD (20%) Optimalisasi PAD dilihat dengan membandingkan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun n,</p> <p>b. APBD yang tepat dan akurat (20%) APBD yang tepat dan akurat diketahui dari</p>	%	100	100	100*	100 (20%+100% (20%+20%+ 20%+20% +20%) (Akumulasi optimalisasi PAD+ laporan keuangan daerah yang akuntabel+ Penatausahaan keuangan daerah yang akurat+ Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten	100 (100/100x100%)	Sangat Baik	100

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR/ PENJELASAN META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	REALI- SASI 2024	TAHUN 2025				TARGE T AKHIR PERIO DE*/RP JMD/R ENSTR A
						TARGET*	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<p>c. ketepatan waktu penyusunan APBD Murni dan APBD Perubahan sesuai dengan tatakala waktu dan akurasinya dilihat dari konsistensi antara program, kegiatan dan sub kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen RAPBD Laporan keuangan daerah yang akuntabel (20%) Laporan keuangan daerah yang akuntabel diukur dengan melihat kelengkapan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) berdasarkan PP.71/2010 dan ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawab an pelaksanaan APBD sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 agar dapat diaudit untuk memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.</p> <p>d. Penatausahaan Keuangan daerah yang akurat (20%) Penatausahaan Keuangan daerah yang akurat untuk mengetahui tingkat akurasi antar dokumen penatausahaan yang diterbitkan dengan membandingkan antara dokumen SP2D dengan dokumen SPM</p> <p>e. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (20%) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten diukur dari upaya yang telah dilakukan untuk melakukan pembinaan pengelolaan</p>								

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR/ PENJELASAN META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	REALI- SASI 2024	TAHUN 2025				TARGE T AKHIR PERIO DE*/RP JMD/R ENSTR A
						TARGET*	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		keuangan daerah pada kabupaten/kota se-DIY, BUMD dan BUKP serta penyusunan regulasi keuangan daerah.								
C	Optimalisasi Aset aset Pemda DIY	<p>Indikator: Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah</p> <p>Meta Indikator: Nilai rupiah optimalisasi Barang Milik Daerah</p> <p>Penjelasan detail dari meta indikator Nilai rupiah optimalisasi barang milik daerah . diperoleh dari realisasi proyeksi barang milik daerah pada pengelola:</p> <ol style="list-style-type: none"> Retribusi rumah dinas, tanah dan bangunan Penjualan Barang Milik Daerah Sewa Tanah dan Bangunan Hasil Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah 	rupiah	15.486.233.611	16.042.037.288	14.213.383.619*	14.924.078.018 (531.753.883+ 2.719.973.024 +4.665.266.0(, 00+7.007.085. 111) (realisasi retibusi rumah dinas, tanah dan bangunan, penjualan barang milik daerah, sewa tanah dan bangunan dan hasil Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah)	105,00% (14.924.078 .018 / 14.213.383. 619) x 100%	Sangat Baik	14.795.584.771
D	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	<p>Indikator: Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</p> <p>Meta Indikator: Nilai Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</p> <p>Penjelasan detail dari meta indikator Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi</p>	Katagori	A	A(94,89)	A (95,00)*	A (95,50) (85,79+9,72) (Hasil Evaluasi RB Perangkat Daerah Tahun 2025)	100,53% (95,50/95,00)	Sangat Baik	A (95,50)

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR/ PENJELASAN META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	REALI- SASI 2024	TAHUN 2025				TARGE T AKHIR PERIO DE*/RP JMD/R ENSTR A
						TARGET*	REALISASI	PERSE TASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pemerintah Daerah. Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan : 1. Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah 2. Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah								

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

1.1.1. Tujuan Perangkat Daerah

Kinerja Tujuan Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut :

Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Tujuan	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan detail dari Meta Indikator
1	2	3	4
Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel	Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel	Secara kualitatif capaian kinerja sebesar 100% dengan formulasi perhitungan: Transparan (50%): Keterlibatan dan aksesibilitas publik dalam proses pengelolaan keuangan (Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (1)) Akuntabel (50%): Dapat dipertanggungjawabkan (Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (5))	Secara kualitatif capaian kinerja sebesar 100% dengan formulasi perhitungan: Transparan (50%): Keterlibatan dan aksesibilitas publik dalam proses pengelolaan keuangan (Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (1)) Indikator Transparan dihitung dari IPKD DIY secara kualitatif dari total IPKD Akuntabel (50%): Dapat dipertanggungjawabkan (Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (5)) Indikator Akuntabel dihitung secara kualitatif dari Opini BPK terhadap LKPD Pemda DIY

Aspek transparan dapat diketahui dari hasil penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi DIY, Indeks Demokrasi Indonesia dan Keterbukaan Informasi Publik untuk mengukur indikator transparan dengan bobot kualitatif sebesar 50%. Adapun aspek akuntabel dihitung secara kualitatif untuk Opini BPK terhadap

Laporan Keuangan Pemda DIY dengan predikat WTP. Formulasi pengukuran secara akumulatif sebagai berikut :

a.Aspek Transparan

$$PKA = \sum(PKT + PKA)$$

Keterangan:

PKA = Pengelolaan Keuangan Transparan dan Akuntabel

PKT = Pengelolaan Keuangan Transparan = 50%

PKA = Pengelolaan Keuangan Akuntabel=50%

Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Opini BPK RI, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III. 4 Transparansi dan Akuntabel Pengelolaan Keuangan dan Aset

No.	Uraian	Indeks/Score/Hasil	Bobot
1	2	3	4
1	Transparan		50%
1.1	IPKD Provinsi DIY	86,761	
1.2	Indek Demokrasi Indonesia	100	
1.3	Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	92,45	
2	Akuntabel		50%
2.1	Opini BPK	WTP	
2.2	Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD	Peringkat I	

Sumber: Kemendagri 2025, LHP BPK RI 2025, data diolah

Dari data di atas, realisasi sub meta indikator telah tercapai secara kualitatif sebesar 50% yang dapat diketahui dari penyampaian informasi keuangan kepada publik melalui website resmi Pemda DIY dan BPKA DIY yang kemudian dilakukan beberapa penilaian sesuai kewenangannya oleh Kementerian Dalam Negeri (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah), BPS RI (Indesk Demokrasi Indonesia) dan Komisi Informasi Daerah (Keterbukaan Informasi Publik). Berdasarkan hasil pengukuran IPKD Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023 (Tahun ukur 2024) total Indeks IPKD Pemda DIY sebesar 86,761. Selain IPKD indikator transparan juga didukung Indeks Demokrasi Indonesia dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset mengampu indikator Transparansi Anggaran dalam bentuk Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah dengan capaian 100% pada tahun 2025 untuk tahun ukur 2024, dan Keterbukaan Informasi Publik, dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset masuk dalam kategori Perangkat Daerah Informatif dengan skor 92,45.

b.Aspek Akuntabel

Sub meta indikator akuntabel realisasinya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana LHP BPK RI Nomor 7A/LHP/XVIII.YOG/04/2025, bobot 50% tercapai. Penghitungan sesuai data di atas, diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{PKA} &= \sum(\text{PKT} + \text{PKA}) \\
 &= 50\% + 50\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Kinerja Tujuan Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III. 5 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025

No	Indikator Tujuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode* /Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
			Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<p>Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel</p> <p><u>Penjelasan Detail Meta Indikator</u> Secara kualitatif capaian kinerja sebesar 100% dengan formulasi perhitungan:</p> <p>Transparan (50%): Keterlibatan dan aksesibilitas publik dalam proses pengelolaan keuangan (Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (1)) Indikator Transparan dihitung dari IPKD DIY secara kualitatif dari total IPKD</p> <p><u>Akuntabel (50%):</u> Dapat dipertanggungjawabkan (Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (5)) Indikator Akuntabel dihitung secara kualitatif dari Opini BPK terhadap LKPD Pemda DIY</p>	100%	100%*	<p>100%</p> <p>(50%+50%)</p> <p>(transparan 50% dan akuntabel 50%)</p>	<p>100%</p> <p>(100/100) x 100%</p>	100 %	<p>100%</p> <p>(100/100) x100%</p>

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

Analisis Ketercapaian Tujuan : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset yang Transparan dan Akuntabel adalah sebagai berikut :

- a. Tercapai 100%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 100% .
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 100%, tetap (target maksimal).

c. Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target tahun 2027 adalah 100%

Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja

- a. Ketersediaan dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat yang memberikan cukup keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menata kelembagaan Perangkat Daerah sebagai salah satu kewenangan dalam urusan keistimewaan.
- b. Komitmen dan pemahaman yang semakin baik dari para stakeholder terkait pengelolaan keuangan, pengelolaan pendapatan dan aset yang berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
- c. Koordinasi dan Kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya secara berkesinambungan yang didukung teknologi informasi berdampak pada kualitas perencanaan penganggaran penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah.

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja

- a. Dinamika Kebijakan dan regulasi nasional terkait perencanaan penganggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, penatausahaan keuangan dan akuntansi pelaporan membutuhkan waktu bagi daerah dalam melakukan penyesuaian

Analisis Faktor Risiko Ketidacapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah kurang optimal	Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur opsen PKB, BBNKB dan tarif baru serta tidak dipungutnya BBNKB kedua dan seterusnya	Penurunan penerimaan pajak daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor akan mempengaruhi kemampuan keuangan daerah	Menyusun pergub tentang opsen PKB dan BBNKB yang didalamnya mengatur tentang sinergi kabupaten/kota dalam pemungutan PKB dan BBNKB
2	Penyesuaian APBD yang dilakukan etika proses pelaksanaan APBD sedang berjalan	Perubahan kebijakan pemerintah dan perubahan prioritas dalam masa pelaksanaan APBD	Pencapaian target dan realiasi pelaksanaan APBD terkendala	Koordinasi secara intensif dengan Kementerian dan pemangku kepentingan
3	Optimalisasi melalui Pemanfaatan Barang Milik Daerah belum memberikan nilai maksimal dalam memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Identifikasi barang milik daerah idle (yang tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas pemerintahan) tidak berjalan dengan baik	Optimalisasi Pemanfaatan BMD tidak dapat dilaksanakan	Montoring BMD Idle di Pengguna

Capaian indikator tujuan tersebut didukung oleh kinerja 3 (tiga) Sasaran Strategis yakni Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, Optimalisasi Aset Pemda DIY dan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah.

1.1.2. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah diukur dengan indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III. 6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan detail dari Meta Indikator
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Secara kualitatif capaian kinerja sebesar 100% yang berasal dari masing-masing bobot perhitungan sebagai berikut : a. Optimalisasi PAD (20%) + b. APBD yang tepat dan akurat (20%) + c. Laporan keuangan daerah yang akuntabel (20%) + d. Penatausahaan Keuangan daerah yang akurat (20%)+ e. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (20%)	Secara kualitatif capaian kinerja sebesar 100% yang berasal dari masing-masing bobot perhitungan sebagai berikut : a. Optimalisasi PAD (20%) Optimalisasi PAD dilihat dengan membandingkan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun n, b. APBD yang tepat dan akurat (20%) APBD yang tepat dan akurat diketahui dari ketepatan waktu penyusunan APBD Murni dan APBD Perubahan sesuai dengan tatakala waktu dan akurasinya dilihat dari konsistensi antara program, kegiatan dan sub kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen RAPBD c. Laporan keuangan daerah yang akuntabel (20%) Laporan keuangan daerah yang akuntabel diukur dengan melihat kelengkapan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) berdasarkan PP.71/2010 dan ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 agar dapat diaudit untuk memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. d. Penatausahaan Keuangan daerah yang akurat (20%) Penatausahaan Keuangan daerah yang akurat untuk mengetahui tingkat akurasi antar dokumen penatausahaan yang diterbitkan dengan memperbandingkan antara dokumen SP2D dengan dokumen SPM e. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (20%) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten diukur dari upaya yang telah dilakukan untuk melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten/kota se-DIY, BUMD dan BUKP serta penyusunan regulasi keuangan daerah.

Sumber data diolah dari hasil evaluasi atas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dihitung secara kualitatif dari 5 (lima) sub meta indikator yang dirumuskan sebagai berikut :

$$KTA = \sum(PAD + PAB + LKA + PKA + PKD)$$

Keterangan:

- KTA = Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel
- PAD = sub meta indikator Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
- PAB = sub meta indikator APBD yang Tepat Waktu dan Akurat
- LKA = sub meta indikator Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel
- PKA = sub meta indikator Penatausahaan Keuangan yang Akurat
- PKD = sub meta indikator Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Konsisten

Penghitungan masing-masing sub indikator adalah sebagai berikut :

1. Sub meta indikator Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, digunakan untuk mengetahui besaran realisasi pendapatan asli daerah pada akhir tahun berjalan, dihitung dengan membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan (r) dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan (t), diformulasikan sebagai berikut :

$$PAD = PAD (r)/PAD(t)$$

Keterangan:

PAD = realisasi PAD
 PAD(r) = realisasi PAD tahun 2025
 PAD(t) = target PAD tahun 2025

Data capaian optimalisasi pendapatan asli daerah adalah sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel III. 7 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

Kode	Uraian	Tahun 2025	
		Target	Realisasi
1	2	3	4
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.704.380.170.749,20	1.739.509.662.495,20
4.1.1	Pajak Daerah	1.521.266.024.486,00	1.541.673.476.325,00
4.1.2	Retribusi Daerah	1.026.953.883,00	1.062.539.730,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	126.006.483.045,00	127.241.046.477,00
4.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	56.080.709.335,00	69.532.599.963,00
	Jumlah	1.704.380.170.749,20	1.739.509.662.495,20

Sumberdata: Perhitungan APBD DIY TA.2025 (Data diolah).

Penghitungan adalah sebagai berikut :

$$PAD = PAD (r)/PAD(t)$$

$$=1.739.509.662.495,20,-/1.704.380.170.749,20,-X 100\%$$

$$= \underline{\underline{102,06\%}}$$

Dari penghitungan tersebut diperoleh hasil 102,06% yang artinya target telah tercapai, sehingga sub meta indikator optimalisasi PAD dengan bobot 20% terpenuhi.

2. Sub meta indikator APBD yang tepat dan akurat digunakan untuk mengetahui ketepatan waktu penyusunan APBD Murni dan APBD Perubahan sesuai dengan tatakala waktu dan akurasi antara data yang telah diinputkan di <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> dengan dokumen RAPBD, diformulasikan sebagai berikut :

$$PAB = (AB+BD((P2/P1+K2/K1))/2$$

Keterangan:

PAB = APBD yang tepat dan akurat
 AB = APBD tepat = 100%
 BD = APBD akurat= 85%(P2/P1) + 15%(K2/K1)x100%
 P2 = program sesuai RAPBD
 P1 = program sesuai KUA PPAS

K2 = kegiatan sesuai RAPBD

K1 = kegiatan sesuai KUA PPAS

Data Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tabel berikut :

Tabel III. 8 Penetapan APBD

Uraian	Tanggal	Nomor	Keterangan
1	2	3	4
APBD P 2025	12 September 2025	5 Tahun 2025	Tepat
APBD 2026	31 Desember 2025	9 Tahun 2025	

Sumber data : BPKA DIY Tahun 2026, diolah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 117 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :

(1) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.

(2) Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Berdasarkan peraturan tersebut maka APBD tahun anggaran 2026 telah ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025.

Demikian halnya dengan penetapan Perubahan APBD yang mendasar pada Pasal 177, bahwa "Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan", maka Perubahan APBD tahun 2025 yang telah ditetapkan pada tanggal 12 September 2025 telah sesuai dengan tata kala waktu.

Tabel III. 9 Program kegiatan dalam RAPBD TA.2026

Uraian	Jumlah		Keterangan
	Program	Kegiatan	
1	2	3	4
RAPBD	143	291	Akurat sesuai dengan ketentuan dan SIPD

Sumber data : BPKA DIY Tahun 2026, diolah

Penghitungan atas data dari kedua tabel di atas, hasilnya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
\text{PAB} &= (100\% + (\text{AB} + \text{BD})/2) \\
&= (100\% + ((85\%(143/141 \times 100) + 15\%(296/291) \times 100))/2) \\
&= (100\% + 86\% + 15\%)/2 \\
&= \underline{\underline{100,5\%}}
\end{aligned}$$

Dari hasil penghitungan di atas, sub meta indikator APBD tepat waktu dan akurat tercapai 100,5%, bobot 20% terpenuhi.

3. Sub meta indikator Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel diukur dengan melihat penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, apabila sesuai dengan opini BPK-Wajar Tanpa Pengecualian maka nilai 60% dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya apabila memenuhi ketentuan dipersyaratkan dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 selesai dalam waktu yang telah ditentukan untuk diaudit Badan Pemeriksa Keuangan, nilai 40%. Formulasi sub meta indikator laporan keuangan yang akuntabel sebagai berikut :

$$\text{LKA} = \text{LK1 (sesuai)} + \text{KA1 (tepat waktu)}$$

Keterangan:

- LKA = Laporan keuangan akuntabel
- LK1 = Laporan keuangan sesuai Opini = 60%
- KA1 = Laporan pertanggungjawaban tepat waktu=40%

Hasil penilaian atas penyajian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III. 10 Kesesuaian dan Ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemda DIY

No	Uraian	Hasil	Ket.
1	2	3	4
1	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LK1)		Sesuai
	1) Opini BPK	WTP	
		Nilai (LK1)	60%
2	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (Permendagri 13/2006) (LK2)		Tepat Waktu
	1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY TA.2024	Perda DIY Nomor 4/2025 tanggal 1 September 2025	
		Nilai (LK2)	40%

Sumber data: LHP BPK RI Tahun 2025, diolah

Penghitungan sesuai data di atas, diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{LKA} &= (\text{LK1 (sesuai)} + \text{LK2 (tepat waktu)}) \\ &= 60\% + 40\% \\ &= \underline{100\%} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil penghitungan, sub meta indikator laporan keuangan yang akuntabel tercapai 100%, bobot 20% terpenuhi.

4. Sub meta indikator Penatausahaan Keuangan yang Akurat untuk mengetahui tingkat akurasi antar dokumen penatausahaan yang diterbitkan dengan memperbandingkan antara dokumen SP2D dengan dokumen SPM, diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{PKA} = (\text{SP2D}/\text{SPM}) \times 100\%$$

Keterangan:

- PKA = penatausahaan keuangan yang akurat
- SP2D = dokumen SP2D yang diterbitkan
- SPM = dokumen SPM yang diterima

Data Realisasi dokumen SP2D dengan dokumen SPM belanja operasi dan belanja operasi non gaji yang diterbitkan selama tahun 2024, sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel III. 11 Realisasi SP2D dan SPM Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah	Ket.
1	2	3	4
1.	SP2D		
	Belanja Gaji	2.497 dokumen	-
	Belanja Non Gaji	10.458 dokumen	-
2.	SPP/SPM		
	Belanja Gaji	2.497 dokumen	-
	Belanja Non Gaji	10.458 dokumen	-

Sumber data: BPKA DIY Tahun 2025, diolah

Penghitungan atas data realisasi SP2D dan SPM di atas, diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PKA} &= \text{SP2D}/\text{SPM} \times 100\% \\ &= (12.955+8.000)/(12.955 +8.000) \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

5. Sub meta indikator kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten, diukur dari upaya yang telah dilakukan untuk melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten/kota se -DIY, pembinaan BUMD dan BUKP serta penyusunan regulasi keuangan daerah, diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{PKD} = \sum(\text{EAP} + \text{EAK} + (\text{EAD}))$$

Keterangan:

- PKD = pembinaan pengelolaan keuangan daerah konsisten
- EAP = evaluasi APBD Kabupaten/Kota
- EAK = pembinaan pengelolaan keuangan

EAD = optimalisasi BUMD

Pengukuran kinerja dihitung dari realisasi atas evaluasi APBD Kabupaten/Kota, Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang telah dilakukan, pembinaan pengelolaan keuangan diukur dari regulasi pengelolaan keuangan yang selesai disusun dan optimalisasi BUMD diukur dari BUMD/BUKP yang dilakukan pembinaan.

Data evaluasi APBD Kab/Kota, pembinaan pengelolaan keuangan, dan optimalisasi BUMD sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel III. 12 Kinerja Evaluasi APBD, Pembinaan Pengelola Keuangan dan Optimalisasi BUMD

No.	Uraian	Target	Realisasi	Persentase	Bobot
1	2	3	4	5	6
1	Evaluasi APBD Kab / Kota (ΣEAP)				33,33%
1.1	Evaluasi APBD			100%	
1.1.1	APBD TA. 2026	5 laporan	5 laporan	100%	
1.1.2	PAPBD TA. 2025	5 laporan	5 laporan	100%	
1.1.3	Pertanggungjawaban APBD TA 2024	5 laporan	5 laporan	100%	
2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan (ΣEAK)				33,34%
2.1	Regulasi Pengelolaan Keuangan			100%	
2.1.1	Regulasi Pengelolaan Keuangan	3 dokumen	4 dokumen	133%	
3	Optimalisasi BUMD (ΣEAD))				33,34%
3.1	Pembinaan BUMD			100%	
3.1.1	Pembinaan BUMD	9 laporan	9 laporan	100%	

Sumberdata : BPKA DIY, Tahun 2025, diolah

Dari data di atas, penghitungan dari sub indikator evaluasi APBD Kabupaten/Kota (EAP) realisasi:100%, bobot 33,33% tercapai, sub indikator pembinaan pengelolaan keuangan (EAK) realisasinya 133%, yang terdiri dari regulasi pengelolaan keuangan yang dapat disusun 4 dokumen dari target 3 dokumen, bobot 33,34% tercapai melebihi target dan sub indikator Optimalisasi BUMD berupa pembinaan terhadap BUMD dan BUKP yang dilaporkan 9 laporan dari target 9 laporan, bobot 33,33% tercapai target. Secara akumulatif sub meta indikator persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah konsisten, adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 PKD &= \Sigma(EAP+EAK+(EAD(DEV(Devbumd+Devbukp))) \\
 &= 33,33\%+33,34\%+33,33\%3 \\
 &= 100\%4
 \end{aligned}$$

Secara akumulatif dari 5 (lima) sub meta indikator tersebut di atas diperoleh capaian sebagai berikut :

Tabel III. 13 Pengukuran Capaian Sasaran 1

Sub meta Indikator	Hasil Sub meta-indikator	Capaian sub meta indikator	Bobot
Optimalisasi PAD (bobot kualitatif sebesar 20%)	1.739.509.662.495,20,-	102,06%	20%
APBD yang tepat dan akurat (bobot kualitatif sebesar 20%)	100%	100%	20%
Laporan keuangan daerah yang akuntabel (bobot kualitatif sebesar 20%)	100%	100%	20%
Penatausahaan Keuangan daerah yang akurat (bobot kualitatif sebesar 20%)	100%	100%	20%
Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (bobot kualitatif sebesar 20%).	100%	100%	20%
Jumlah (PKD)			100%

Kinerja sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode*/ Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027* (%)
			Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Meta Indikator: Secara kualitatif capaian kinerja sebesar 100% dengan formulasi perhitungan: 1. Optimalisasi PAD (bobot 20%) 2. APBD yang tepat waktu dan akurat (bobot 20%) 3. Laporan keuangan daerah yang akuntabel (bobot 20%)	100%	100%*	100% (20%+20%+20%+20%+20%+20%) (Akumulasi optimalisasi PAD+ laporan keuangan daerah yang akuntabel+ Penatausahaan keuangan daerah yang akurat+ Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten	100 (100%/100% x 100%)	100%*	100
	4. Penatausahaan keuangan daerah yang akurat (bobot 20%) 5. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (bobot 20%)						
	Penjelasan detail dari Meta Indikator sebagai berikut : 1. Optimalisasi PAD (20%) Optimalisasi PAD dilihat dengan membandingkan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun n, 2. APBD yang tepat dan akurat (20%) APBD yang tepat dan akurat diketahui dari ketepatan waktu penyusunan APBD Murni dan APBD Perubahan sesuai dengan tatakala waktu dan akurasinya						

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode*/ Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027* (%)
			Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>dilihat dari konsistensi antara program, kegiatan dan sub kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen RAPBD</p> <p>3. Laporan keuangan daerah yang akuntabel (20%) Laporan keuangan daerah yang akuntabel diukur dengan melihat kelengkapan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) berdasarkan PP.71/2010 dan ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 agar dapat diaudit untuk memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.</p> <p>4. Penatausahaan Keuangan daerah yang akurat (20%) Penatausahaan Keuangan daerah yang akurat untuk mengetahui tingkat akurasi antar dokumen penatausahaan yang diterbitkan dengan membandingkan antara dokumen SP2D dengan dokumen SPM</p> <p>5. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (20%) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten diukur dari upaya yang telah dilakukan untuk melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten/kota se-DIY, BUMD dan BUKP serta penyusunan regulasi keuangan daerah.</p>						

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

Analisis Ketercapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Tercapai 100%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100%
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 100%, tercapai (target maksimal).
- c. Capaian target indikator pada Tahun 2025 terhadap target target 2027 sebesar 100%.

Keberhasilan capaian Sasaran 1 dengan Indikator Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah tersebut didukung keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel III. 14 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran

Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	51,94	52,82	101,69%
1.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100	100	100%
1.1.1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah: 1 Dokumen dari 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.1.2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah: 1 Laporan dari 1 Laporan Daerah.	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.1.3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah: 2 laporan dari 2 laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
1.1.4. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah: 2 laporan dari 2 laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	100	100%
	Return On Aset (RoA) BUMD	1,90	4,71	432,11%
2.1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS, koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS perubahan, Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi DPA/DPPA SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perda APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD, Koordinasi dan Penyusunan Perda APBD Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Perubahan, serta Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100	100	100%
2.1.1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun: 2 Dokumen dari 2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
2.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun: 2 Dokumen dari 2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.1.3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi: 32 Dokumen dari 32 Dokumen	32 Dokumen	32 Dokumen	100%
2.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD: 2 dokumen dari 2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%
2.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD: 6 dokumen dari 6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%
2.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran: 30 dokumen dari 30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	100%
2.2. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	100	100%
2.2.1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota: 5 Laporan dari 5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%
2.2.2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota: 5 Laporan dari 5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%
2.2.3. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota: 5 Laporan dari 5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%
2.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah: 2 Dokumen dari 2 Dokumen			
2.3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	100	100	100%
2.3.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK): 2 Laporan dari 2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
2.3.2. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait: 8000 dokumen dari 8000 dokumen	8000 dokumen	8000 dokumen	100%
2.4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	100	100%
2.4.1. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran: 12 Laporan dari 12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.4.2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi: 2 Laporan dari 2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
2.4.3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban	2 Dokumen	2 dokumen	100%

Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Pelaksanaan APBD Provinsi: 2 Dokumen dari 2 Dokumen			
2.4.4. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD: 1 Dokumen dari 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.4.5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah: 1 Dokumen dari 1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100%
2.4.6. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: 1 Dokumen dari 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.4.7. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi: 80 Orang dari 80 Orang	80 Orang	80 Orang	100%
2.4.8. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina: 16 lembaga dari 8 Lembaga	8 Lembaga	16 lembaga	200%
2.5. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	100	100%
2.5.1. Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah: 6 laporan dari 6 laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%
2.5.2. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan: 1 laporan dari 1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%
2.5.3. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak: 1 laporan dari 1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%
2.5.4. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi: 1 laporan dari 1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%

Capaian tersebut didukung dari :

- a. Capaian kinerja program pengelolaan pendapatan daerah pada akhir tahun 2025 terealisasi 52,82% melampaui target yang ditetapkan sebesar 51,94% atau 101,69% dari total target tahun 2025.

Kinerja tercapai didukung oleh berbagai upaya guna mendorong optimalnya pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah guna memperkuat kondisi fiskal daerah serta aktif melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah karena Daerah yang mampu menggali dan mengoptimalkan potensi keuangannya akan lebih mandiri, adaptif, dan berdaya saing dalam menjalankan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Opsen Pajak, hal ini tentunya memberikan tantangan dan juga peluang dalam pemungutan pajak di tahun 2025 ini, dalam rangka optimalisasi capaian pendapatan dan juga pelaksanaan opsen yang optimal, Pemda DIY bekerjasama dengan pemerintah kab/kota untuk sinergi pelaksanaan opsen, Pemerintah kabupaten/kota turut andil mendukung secara pendanaan maupun sarpras guna mendukung layanan Kesamsatan di masing-masing KPPD diwilayahnya, serta sinergi dalam hal melakukan pendataan wajib pajak, hal ini memberikan pengaruh dan dampak baik dalam capaian pajak di tahun 2025 ini.

Capaian pendapatan asli daerah yang optimal tersebut merupakan capaian kinerja program pengelolaan pendapatan daerah, dimana kinerja tersebut merupakan kinerja dari BPKA dan 5 KPPD DIY di Kab/kota dengan meta indikator Jumlah pendapatan asli daerah (PAD dikurangi 50% pajak rokok) dibagi jumlah pendapatan yang belum ditentukan peruntukan belanjanya (non-Earmark) x 100%. sampai dengan triwulan IV 2025. Capaian indikator kinerja program yang dapat diperoleh adalah sebesar 52,82% atau mencapai 101,69% dari target yang ditetapkan sebesar 51,49%.

b. Capaian Kinerja Program pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 2 indikator yaitu 1) Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 2) Return On Asset (RoA) BUMD (%).

1) Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara kualitatif telah tercapai sebesar 100% merupakan akumulatif dari masing-masing sub meta indikator (25%+25%+25%+25% = 100%) dengan rincian sebagai berikut :

1.1. Ketepatan waktu dan kesesuaian program dan kegiatan KUA PPAS, RAPBD dan APBD (dengan bobot 25%).

Untuk mendukung ketepatan waktu dalam Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS, Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD upaya yang dilakukan antara lain menyelesaikan seluruh proses penyusunan Perubahan APBD DIY Tahun 2025 sesuai dengan Program Kegiatan dalam KUA PPAS dengan telah ditetapkannya Perda DIY No. 5 Tahun 2025 tentang PAPBD DIY TA 2025, dan Peraturan Gubernur DIY No.31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD DIY TA 2025 dan menyelesaikan seluruh proses penyusunan APBD Pemda DIY Tahun 2026 dengan telah ditetapkannya Perda DIY No. 9 Tahun 2025 tentang APBD DIY TA 2026 pada tanggal 31 Desember 2025 dan Peraturan Gubernur DIY No.56 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD DIY TA 2026 pada

tanggal 31 Desember 2025.

- 1.2. Ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD (dengan bobot 25%).

Untuk menyusun laporan keuangan yang akuntabel, telah menyelesaikan seluruh proses akuntansi dan pelaporan pelaksanaan keuangan daerah dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 selain itu BPK memberikan opini WTP untuk LKPD DIY Tahun Anggaran 2023. Hal ini menjadi tanda keberhasilan bagi DIY dalam mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut, selain laporan Perkembangan atas Penyelesaian TPTKD di Pemda DIY telah disampaikan ke Kemendagri.

- 1.3. Keakuratan dalam penatausahaan keuangan Daerah (dengan bobot 25%).

Upaya yang dilakukan dengan verifikasi dan pengesahan Perubahan DPA Tahun Anggaran 2025 serta Pengesahan DPA Tahun anggaran 2026, melaksanakan penatausahaan keuangan daerah, menerbitkan SPD, SPM dan SP2D, rekonsiliasi dengan instansi dan stakeholder terkait, mengimplementasikan KKPD dan mensosialisasikan aktivasi cortex yang dipimpin oleh Wakil Gubernur DIY.

- 1.4. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (dengan bobot 25%).

Upaya yang telah dilaksanakan di antara lain melaksanakan evaluasi APBD TA 2026, Perubahan APBD TA 2025 dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kota TA 2024, pembinaan terhadap BUMD, BUKP dan BLUD serta menyelenggarakan rapat kerja sebagai bagian dari upaya untuk melakukan evaluasi kinerja BUMD dan BUKP serta melaksanakan pengawalan atas perencanaan dan penganggaran penyertaan modal kepada BUMD DIY pada dokumen APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 dalam rangka memastikan kecukupan alokasi anggaran penyertaan modal dimaksud.

2. Return On Aset (RoA) BUMD.

Return on Assets (ROA), yaitu rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan,

dengan laba bersih (dari laporan laba rugi) dibagi total aset (dari neraca) dan hasilnya dalam persentase untuk menunjukkan profitabilitas setiap rupiah aset yang dimiliki, semakin tinggi semakin baik efisiensi perusahaan. Indikator kinerja RoA merupakan target penyelarasan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045. Sesuai dengan RPJPD target baseline di 2025 dihitung dari nilai rata-rata RoA BUMD Pemda.

Ditarget sebesar 1,90% pada tahun 2025 dengan realisasi 4.71%.. Realisasi sementara untuk RoA pada BUMD DIY sebagaimana disampaikan pada tabel berikut :

Tabel III. 15 Realisasi Roa pada BUMD DIY

No	Uraian	2025	Keterangan
1	PT Bank BPD DIY (audited)		
	Aset	22.211	dalam miliar rupiah
	Laba (Rugi) Bersih	447	dalam miliar rupiah
	RoA	2,01%	
2	PT Taru Martani (unaudited)		
	Aset	69.860	dalam juta rupiah
	Laba (Rugi) Bersih	11.186	dalam juta rupiah
	RoA	16,01%	
3	PT AMI (unaudited)		
	Aset	125.448.097.500	dalam rupiah
	Laba (Rugi) Bersih	7.949.490.247	dalam rupiah
	RoA	6,34%	
4	PDAB Tirtatama (audited)		
	Aset	143.519.952.234	dalam rupiah
	Laba (Rugi) Bersih	(2.693.431.806)	dalam rupiah
	RoA	-1,88%	
5	BUKP DIY (unaudited)		
	Aset	277.776.811.748	dalam rupiah
	Laba (Rugi) Bersih	2.915.383.595	dalam rupiah
	RoA	1,05%	
	Rata-rata	4,71%	

Faktor Pendukung Keberhasilan:

1. Komunikasi yang terjalin baik antara TAPD dengan OPD sehingga dinamika penyusunan dokumen perencanaan dapat direspon dengan cepat
2. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target

3. Pengelolaan BUMD secara profesional untuk menciptakan BUMD yang sehat dan kuat secara keuangan

4. Optimalisasi peran BUMD dalam pelayanan publik dan kontribusi terhadap PAD

Faktor penghambat keberhasilan antara lain:

1. Perkembangan yang dinamis di dalam peraturan perundangan membutuhkan waktu dalam penyesuaian kebijakan di daerah

2. Lambatnya evaluasi oleh Kemendagri

Analisis Faktor Risiko Ketidakaapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	Sistem Pengelolaan Keuangan yang tersentral	Ketika Sistem pengelolaan keuangan yang tersentral tidak dapat diakses	Proses pencairan dana terhambat	koordinasi dengan Pusdatin dan dirjen bina keuda kemendagri

1.1.3 Sasaran 2: Sasaran Optimalisasi Aset Pemda DIY

Kinerja Sasaran Optimalisasi Aset Pemda DIY diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut :

Tabel III. 16 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan detail dari Meta Indikator
1	2	3	4
Optimalisasi Aset Pemda DIY	Optimalisasi Barang Milik Daerah	Nilai Rupiah Optimalisasi Barang Milik Daerah	Nilai rupiah optimalisasi barang milik daerah . diperoleh dari realisasi proyeksi barang milik daerah pada pengelola: 1. Retribusi rumah dinas, tanah dan bangunan 2. Penjualan Barang Milik Daerah 3. Sewa Tanah dan Bangunan 4. Hasil Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Sumber data diolah dari perhitungan nilai rupiah yang dapat direalisasikan dari proyeksi barang milik daerah pada pengelola, perumusannya sebagai berikut :

$$OBP = (RDTB+PBMD+STDB+HKPB)$$

Keterangan:

- OBP = Optimalisasi Barang Milik Daerah
- RDTB = Retribusi Rumah Dinas , Tanah dan Bangunan
- PBMD = Penjualan Barang Milik Daerah
- STDB = Sewa Tanah dan Bangunan
- HKPB = Hasil Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Data realisasi atas proyeksi optimalisasi Barang Milik Daerah pada pengelola barang milik daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III. 17 Realisasi Optimalisasi Barang Milik Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	2	3
1	Retribusi Rumah Dinas, Tanah dan Bangunan	531.753.883
2	Penjualan Barang Milik Daerah	2.719.973.024
	- Penjualan Peralatan Mesin	1.008.472.400
	- Penjualan Gedung dan Bangunan	1.491.175.625
	- Penjualan Hewan Ternak	220.324.999
3	Sewa Tanah dan Bangunan	4.665.266.000
4	Hasil Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah	7.007.085.111
	Jumlah (Σ)	14.924.078.018

Sumber data: Laporan Neraca Aset BPKA DIY Tahun 2025, diolah

Hasil penghitungan nilai optimalisasi barang milik daerah pada pengelola barang milik daerah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{OAP} &= (\text{RDTB} + \text{PBMD} + \text{STDB} + \text{HKPB}) \\
 &= 531.753.883 + 2.719.973.024 + 4.665.266.000 + 7.007.085.111 \\
 &= \underline{\underline{14.924.078.018}}
 \end{aligned}$$

Kinerja sasaran Optimalisasi Aset Pemda DIY dengan indikator Optimalisasi Barang Milik Daerah digambarkan sebagai berikut :

Tabel III. 18 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode* / Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027* (%)
			Target*	Realisasi	%Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<p>Optimalisasi Barang Milik Daerah</p> <p>Meta Indikator: Nilai rupiah optimalisasi Barang Milik Daerah</p> <p>Penjelasan detail Meta indikator Nilai rupiah optimalisasi barang milik daerah . diperoleh dari realisasi proyeksi barang milik daerah pada pengelola:</p> <ol style="list-style-type: none"> Retribusi rumah dinas, tanah dan bangunan Penjualan Barang Milik Daerah Sewa Tanah dan Bangunan Hasil Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah 	16.042.037.288	14.213.383.619*	<p>14.924.078.018</p> <p>(531.753.883+2.719.973.024+4.665.266.000+7.007.085.111)</p> <p>(realisasi retribusi rumah dinas, tanah dan bangunan, penjualan barang milik daerah, sewa tanah dan bangunan dan hasil Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah)</p>	<p>105,00%</p> <p>(14.924.078.018 / 14.213.383.619) x 100%</p>	14.795.584.771	<p>100,87%</p> <p>(914.924.078.018/14.795.584.771)</p>

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

Analisis Ketercapaian Sasaran 2 Optimalisasi aset-aset Pemda adalah sebagai berikut :

- a. Tercapai Rp14.924.078.018,- dari proyeksi Rp14.213.383.619,- dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 105,00% melampaui target kinerja hasil penyelarasan kinerja.
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp16.042.037.288,- terdapat penurunan sebesar Rp1.117.959.270,- atau 6,97%.
- c. Capaian target indikator pada Tahun 2025 terhadap target 2027 adalah 100,87%.

Keberhasilan capaian Sasaran 2 dengan Indikator Optimalisasi Barang Milik Daerah pada pengelola tersebut didukung keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel III. 19 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran

Program/Kegiatan /subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	100	100	100
1.1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	100	100	100
1.1.1. Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun: 1 dokumen dari 1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100
1.1.2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.	Jumlah Dokumen RKBMD: 1 dokumen dari 1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100
1.1.3. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah: 2 Laporan dari 2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100
1.1.4. Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah: 1 Laporan dari 1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100
1.1.5. Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah: 2 Laporan dari 2 laporan	2 Laporan	2 Laporan	100
1.1.6. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah: 3 Dokumen dari 3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100

Capaian tersebut didukung dari :

Capaian Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Capaian kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dihitung secara kualitatif dengan realisasi sebesar 100% dengan formulasi penghitungan sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penetapan RKBMD dengan bobot 20%.

Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan pendampingan penyusunan

RKBMD sehingga dokumen Perubahan RKBMD 2025 dan RKBMD 2026 tersusun sesuai tatakala waktu.

2. Ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan BMD dengan bobot 20%
Pelaporan BMD Tahun 2025 tersusun dengan adanya upaya pelaksanaan bimtek aset tetap dan persediaan, pendampingan dalam rangka penyusunan laporan BMD semester II dan dengan melaksanakan inventarisasi BMD berupa peralatan dan mesin. Selain itu juga dilaksanakan rekonsiliasi aset tetap dan persediaan dalam rangka penyusunan laporan aset dan persediaan
3. BMD *idle* yg dioptimalkan dengan bobot 15%.
Upaya yang telah dilakukan yaitu melaksanakan Penilaian BMD Idle dalam rangka Pemanfaatan BMD
4. Kelengkapan dokumen administrasi pemindahtanganan dan penghapusan BMD dengan bobot 15%
Upaya yang dilakukan dengan melakukan administrasi pemindahtanganan dan penghapusan BMD melalui penjualan barang milik daerah, diantaranya berupa peralatan dan mesin, kendaraan bermotor dinas operasional, sisa bongkaran material bangunan
5. Ketepatan waktu penetapan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga (SSH) dengan bobot 20%.
Upaya yang telah dilakukan yaitu dengan melakukan tindak lanjut Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka BPKA DIY sesuai tugas fungsinya melaksanakan Penyusunan Peraturan Gubernur DIY Nomor 14 Tahun 2025 tentang Administrasi Perjalanan Dinas
6. Kelengkapan tanda kepemilikan barang milik daerah dengan bobot 10%
Upaya yang telah dilakukan yaitu dengan melakukan proses sertifikasi atas aset tanah Pemda DIY.

sehingga total penjumlahan dari masing-masing sub meta indikator 100%.

Faktor Pendukung Keberhasilan:

- a. Melaksanakan proses pemilihan mitra Kerjasama pemanfaatan (KSP) Eks Hotel Mutiara.
- b. Proses hibah tanah, bangunan dan kendaraan hasil rampasan KPK RI
- c. Adanya percepatan penjualan barang milik daerah usulan OPD sehingga target penjualan dapat tercapai.

Faktor penghambat keberhasilan antara lain:

1. Penilai Aset Pemerintah di Pemda DIY belum tersedia sehingga masih menggunakan konsultan jasa penilai independent.
2. Adanya paket lelang yang tidak terealisasi karena aturan pihak eksternal (KPKNL)

- Adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai permintaan eksternal BPK yang meminta agar BMD tanah dan bangunan masih berilai Rp0 dinilai berdasarkan NOP dan tidak menggunakan penilaian pihak ketiga KJPP.

Analisis Faktor Risiko Ketidacapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	Optimalisasi Pemanfaatan BMD tidak dapat dilaksanakan	Identifikasi barang milik daerah idle (yang tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas pemerintahan) tidak berjalan dengan baik	Optimalisasi Pemanfaatan BMD tidak dapat dilaksanakan	Montoring BMD Idle di Pengguna

1.1.4. Sasaran 3: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah.

Kinerja sasaran Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah diukur dengan Indikator dan meta indikator sebagai berikut :

Tabel III. 20 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan detail dari Meta Indikator
1	2	3	4
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada tahun-n	Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan : 1. Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah 2. Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah

Sumber data diolah dari hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025, menggunakan indikator yang dirumuskan oleh Koordinator Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 358 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025. Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu dan mempertimbangkan beberapa ketentuan dari Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025.

Rumusan Indikator Hasil Evaluasi Reformasi Perangkat daerah diformulasikan sebagai berikut :

$$RB = RB(g) + RB(t)$$

Keterangan:

RB = Nilai Reformasi Birokrasi

RB (g) = Nilai Reformasi General Tahun n

RB (t) = Nilai Reformasi Tematik Tahun n

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel III. 21 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Unit Kerja	Nilai Total RB General 2025	Nilai Total RB Tematik 2025	INDEKS RB 2025	Kategori	Predikat	Nilai Total RB General 2024	Nilai Total RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	GAP
1	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	87,14	8,77	95,90	A	Memuaskan	86,95	8,92	95,87	0,03
2	Biro Hukum Setda DIY	84,08	6,83	90,91	A	Memuaskan	84,28	5,85	90,13	0,78
3	Biro Organisasi Setda DIY	86,61	10,10	96,71	A	Memuaskan	87,57	9,06	96,63	0,08
4	Biro Umum dan Protokol Setda DIY	86,15	5,73	91,88	A	Memuaskan	83,26	5,18	88,44	3,45
5	Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY	85,41	12,67	98,08	A	Memuaskan	83,51	10,23	93,74	4,33
6	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	84,31	7,65	91,96	A	Memuaskan	86,60	6,88	93,48	-1,52
7	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	82,23	11,05	93,28	A	Memuaskan	83,78	8,29	92,07	1,21
8	Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda DIY	85,25	7,39	92,64	A	Memuaskan	n/a	n/a	n/a	n/a
9	Paniradya Kaistimewan	85,47	10,99	96,46	A	Memuaskan	84,31	9,68	93,99	2,46
10	Sekretariat DPRD DIY	83,78	5,96	89,74	A	Memuaskan	83,65	5,11	88,76	0,98
11	Inspektorat DIY	88,75	9,42	98,17	A	Memuaskan	89,25	6,99	96,24	1,93
12	Dinas Pariwisata DIY	86,27	9,75	96,02	A	Memuaskan	84,64	8,51	93,15	2,87

No	Unit Kerja	Nilai Total RB General 2025	Nilai Total RB Tematik 2025	INDEKS RB 2025	Kategori	Predikat	Nilai Total RB General 2024	Nilai Total RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	GAP
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	87,94	13,06	101,00	AA	Sangat Memuaskan	86,95	12,05	99,00	2,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	82,98	14,46	97,44	A	Memuaskan	84,07	11,40	95,47	1,98
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	84,21	15,70	99,91	A	Memuaskan	85,45	12,00	97,45	2,46
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	85,92	12,81	98,73	A	Memuaskan	84,94	7,61	92,55	6,18
17	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	83,41	16,34	99,75	A	Memuaskan	85,22	11,94	97,16	2,59
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	85,16	11,41	96,57	A	Memuaskan	85,47	8,46	93,93	2,64
19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	83,02	15,81	98,83	A	Memuaskan	83,49	12,39	95,88	2,95
20	Dinas Perhubungan DIY	83,96	12,24	96,20	A	Memuaskan	82,98	7,19	90,17	6,02
21	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana) DIY	84,63	11,69	96,32	A	Memuaskan	83,26	7,38	90,64	5,68
22	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	87,15	13,27	100,42	AA	Sangat Memuaskan	86,94	12,54	99,48	0,94
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY	85,06	11,44	96,50	A	Memuaskan	85,06	7,55	92,61	3,89
24	Dinas Kesehatan DIY	85,44	15,09	100,53	AA	Sangat Memuaskan	87,83	9,64	97,47	3,07
25	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	85,45	13,73	99,18	A	Memuaskan	82,52	9,94	92,46	6,73
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	88,32	10,42	98,74	A	Memuaskan	89,36	6,94	96,30	2,44
27	Dinas Sosial DIY	86,90	13,56	100,46	AA	Sangat Memuaskan	86,52	8,74	95,26	5,20

No	Unit Kerja	Nilai Total RB General 2025	Nilai Total RB Tematik 2025	INDEKS RB 2025	Kategori	Predikat	Nilai Total RB General 2024	Nilai Total RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	GAP
28	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	83,00	10,32	93,32	A	Memuaskan	82,61	6,29	88,90	4,42
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY	85,77	12,01	97,78	A	Memuaskan	85,13	9,11	94,24	3,54
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY	83,08	12,03	95,11	A	Memuaskan	n/a	n/a	n/a	n/a
31	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	81,37	8,76	90,13	A	Memuaskan	80,52	4,55	85,07	5,07
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah DIY	86,64	12,86	99,50	A	Memuaskan	88,83	10,25	99,08	0,42
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	85,79	9,72	95,50	A	Memuaskan	87,67	7,22	94,89	0,61
34	Badan Kepegawaian Daerah DIY	88,12	9,46	97,58	A	Memuaskan	89,65	7,04	96,69	0,89
35	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	86,37	10,48	96,85	A	Memuaskan	88,09	8,04	96,13	0,72
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	85,46	8,51	93,97	A	Memuaskan	85,71	5,65	91,36	2,61
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	82,00	7,97	89,96	A	Memuaskan	80,83	6,33	87,16	2,80
38	Badan Penghubung Daerah DIY	81,41	7,82	89,23	A	Memuaskan	84,30	4,13	88,43	0,80
Rata-Rata		85,11	10,98	96,09			85,31	8,31	93,62	2,47

Sumber data: Biro Organisasi Setda DIY, Januari 2026 (data diolah)

Tabel III. 22 Kategori Hasil Evaluasi RB Tahun 2024 berdasar PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Kriteria	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	> 100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK
2	A	>80 -100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
4	B	>60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	CC	>50 -60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
6	C	>30 - 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
7	D	0 -30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK

Sumber data: PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

Dari Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025, Indek Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY adalah 91,66 dan sesuai dengan Kategori

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 berdasar PerMenPAN RB Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, berada pada nilai/angka : >80-100 dengan predikat “memuaskan”, kriteria A, penghitungan Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{RB} &= \text{RB(g)} + \text{RB(t)} \\
 &= 85,7871 + 9,7150 \\
 &= 95,5021 \\
 &= 95,50 \text{ (Pembulatan)} \\
 &= \text{A}
 \end{aligned}$$

Kinerja sasaran meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah digambarkan sebagai berikut :

Tabel III. 23 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode*/ Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027* (%)
			Target*	Realisasi	%Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kategori RB Perangkat Daerah <u>Meta indikator:</u> Nilai Kategori Reformasi Birokrasi Penjelasan detail dari Meta Indikator: Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan : 1. Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah 2. Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah	A (94,89)	A (95,00)*	A (95,50) (Hasil Evaluasi RB Perangkat Daerah Tahun 2025)	A 100,53% (95,50/95,00x 100%)	A (95,50)*	100 % (95,50/95.50x 100%)

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasn Kinerja

Analisis Ketercapaian Sasaran 3: Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY mendapatkan nilai skor Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah 95,50 dengan Kategori A (Memuaskan);
- b. Target tahun 2025 A (95,00) realisasi A (95,50), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100,53% (terlampaui).
- c. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 94,89, terdapat kenaikan sebesar 0,61.
- d. Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target tahun 2027 adalah 100 %

Keberhasilan Sasaran 3 dengan Indikator Kategori Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah tersebut didukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel III. 24 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3

Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,95	91,75	106,74
1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertelaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100
1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 6 dokumen dari 6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100
1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD: 2 dokumen dari 2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100
1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 7 laporan dari 7 laporan	7 Laporan	7 Laporan	100
1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,95	91,75	106,74
1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 240 org/bulan dari 240 org/bulan	240 Orang/Bulan	240 Orang/Bulan	100
1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 12 dokumen dari 12 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100
1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: 1 laporan dari 1 laporan	1 laporan	1 laporan	100
1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	2 Laporan	2 Laporan	100

Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD: 2 Laporan dari 2 Laporan			
1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,95	91,75	106,97
1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD: 12 laporan dari 12 laporan	12 laporan	12 laporan	100
1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,95	91,75	106,74
1.4.1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai: 12 Dokumen dari 12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100
1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,95	91,75	106,74
1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan: 1 paket dari 1 paket	1 paket	1 paket	100
1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 4 paket dari 4 paket	4 paket	4 paket	100
1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan: 1 paket dari 1 paket	1 paket	1 paket	100
1.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistic yang disediakan 6 paket dari 6 paket	6 paket	6 paket	100
1.5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 3 paket dari 3 paket	3 paket	3 paket	100
1.5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan: 2 Dokumen dari 2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1.5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 12 laporan dari 12 laporan	12 laporan	12 laporan	100
1.5.8. Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD: 12.000 dokumen dari 12.000 dokumen	12.000 dokumen	12.000 dokumen	100
1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,95	91,75	106,74
1.6.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan: 39 unit dari 39 unit	39 unit	39 unit	100
1.6.2. Pengadaan Gedung	Jumlah unit Gedung Kantor atau	1 unit	1 unit	100

Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Kantor atau bangunan lainnya	bangunan lainnya yang disediakan : 1 unit dari 1 unit			
1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,95	91,75	106,74
1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat: 1 Laporan dari 1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100
1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 12 Laporan dari 12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100
1.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 3 Laporan dari 3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100
1.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 12 Laporan dari 12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100
1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,95	91,75	106,74
1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya: 1 unit dari 1 unit	1 unit	1 unit	100
1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 17 Unit dari 17 Unit	17 Unit	17 Unit	100
1.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 85 Unit dari 85 Unit	85 Unit	85 Unit	100
1.8.4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi: 4 unit dari 4 unit	4 unit	4 unit	100
1.8.5. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi: 4 unit dari 4 unit	4 unit	4 unit	100

Capaian tersebut didukung dari :

- a. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Realisasi kinerja merupakan rata-rata nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yaitu sebesar 91,75% sebagai dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD secara maksimal.

Faktor Pendukung Keberhasilan :

1. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara TAPD dengan Perangkat Daerah sehingga dinamika penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dapat direspon dengan cepat
2. Koordinasi, kerjasama dan kolaborasi yang baik secara internal maupun eksternal sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target.
3. Adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, susunan organisasi tugas, fungsi dan tata kerja Badan, Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
4. Koordinasi, kerjasama dan kolaborasi yang baik secara internal maupun eksternal;
5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi di internal maupun eksternal;
6. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan Sarana Prasarana yang memadai mendukung pelaksanaan kegiatan.

Faktor Penghambat Keberhasilan :

1. Realisasi fisik sudah sesuai dengan target, adanya anggaran yang merupakan persediaan dan deviasi yang merupakan efisiensi sehingga realisasi keuangan menyesuaikan kebutuhan dan tidak maksimal.

Analisis Faktor Risiko Ketidacapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian (faktor penghambat perlu dimitigasi dg baik agar kinerja dapat tercapai)

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	Keterlambatan pelaksanaan kegiatan	Proses administrasi dan pengadaan yang memerlukan waktu lebih lama dari perencanaan	Penyerapan anggaran dan capaian output tidak sesuai jadwal	Penyusunan jadwal kegiatan yang lebih realistis serta pemantauan pelaksanaan secara berkala
2	Belum optimalnya koordinasi antar unit kerja	Peran dan tanggung jawab belum terdefinisi secara jelas	Tumpang tindih pelaksanaan kegiatan dan inefisiensi pelaksanaan	Penguatan koordinasi lintas unit melalui forum rutin dan penegasan pembagian tugas
3	Kualitas data kinerja kurang memadai	Data belum terintegrasi dan belum diperbarui secara berkala	Pengambilan keputusan dan pelaporan kinerja kurang akurat	Pemutakhiran data secara berkala dan penguatan sistem informasi kinerja

3.2 Capaian Kinerja Lainnya

a. Capaian Kinerja Indikator Rasio Pendapatan Daerah terhadap PDRB (%)

Sesuai dengan berita Acara Penyelarasan Kinerja, Indikator Rasio Pendapatan Daerah terhadap PDRB merupakan indikator hasil penyelarasan terhadap RPJPD DIY Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029, Indikator tersebut menjadi salah satu indikator Kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang ditargetkan 2,77% tahun 2025. Adapun gambaran rasio pendapatan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY tahun 2025, target Pendapatan 2025 dalam RAPBD 2025 adalah 5,4 trilyun rupiah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah 1,68 trilyun rupiah dan Pendapatan Transfer 3,52 trilyun rupiah, sedang proyeksi PDRB 2025 pada kisaran 190 trilyun rupiah s.d 200 trilyun rupiah (*Sumberdata: Humas Pemda DIY*) Rasio adalah Pendapatan Daerah sebesar 5,4 tilyun dibagi nilai tengah proyeksi PDRB 195 trilyun maka besarnya adalah 2,769%.

b. Capaian Kinerja *Sustainable Development Goals* (SDGs)

OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset mendukung Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) pada tujuan :

1. Tujuan nomor 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh dan mendukung target mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat, indikator proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui dan target Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini WTP dengan indikator lokal Opini BPK.
2. Tujuan nomor 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan dan mendukung target memperkuat mobilisasi sumberdaya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya indikator total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya, Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB, proporsi anggaran domestik yang didanai oleh PAD.

Dalam rangka mewujudkan tujuan nomor 16, upaya yang dilakukan terakomodir melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

- A. Program Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan:
1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah:
 - 1.1. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS,
 - 1.2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 1.3. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - 1.4. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - 1.5. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah:
 - 2.1. Sub kegiatan kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - 2.2. Sub kegiatan Penyiapan Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah:
 - 3.1. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - 3.2. Sub kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.3. Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Raperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD .Provinsi
 - 3.4. Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.
 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - 4.1. Sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - 4.2. Sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - 4.3. Sub kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota

B. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah:
 - 1.1. Sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 - 1.2. Sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - 1.3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - 1.4. Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah
 - 1.5. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - 1.6. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan nomor 17, upaya yang dilakukan terakomodir melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan kegiatan:

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah:
 - 1.1. Sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 - 1.2. Sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - 1.3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - 1.4. Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah
 - 1.5. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - 1.6. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terkait kinerja yang ditargetkan pada 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Target mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat, indikator proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui, target 100% realisasi 100%, pada tahun 2024 terealisasi 100% dan Rencana Tahun 2026 target 100%.
- b. Target Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini WTP indikator Opini BPK.dengan Indikator WTP, target WTP, realisasi WTP, pada tahun 2024 teralisasi WTP dan rencana 2026 target WTP.

2. Capaian Kinerja Program Prioritas Pemda DIY

Penetapan Keputusan Gubernur DIY Nomor 353/KEP/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163/KEP/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Program Prioritas Pembangunan yang meliputi 17 (tujuh belas) Program Prioritas untuk dipercepat pelaksanaannya merupakan salah satu upaya mempercepat pencapaian Visi DIY 2025 Pemerintah Daerah. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan keuangan, BPKA DIY tidak mengampu secara spesifik Program Prioritas Pemda, namun turut mengawal ketersediaan anggaran melalui proses pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, penatausahaan dan akuntansi pelaporan.

c. Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran BPKA DIY terhadap capaian sasaran Pemda DIY dan Program Pemda

Sebagaimana amanat *Cascading* Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program Pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel III. 25 Kontribusi Tujuan dan Sasaran BPKA DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK 2. Nilai akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	WTP AA	*) WTP AA	Tujuan :	Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100%	100%
					Sasaran :			
					1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100%	100%
					2. Optimalisasi aset Pemda DIY	Optimalisasi Barang Milik Daerah	Rp 14.213.383.619,-	Rp 14.924.078.018,-
					3. Meningkatkan Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	A(95,00)	A(95,50)

Penjelasan:

1. Opini BPK WTP dan Nilai Akuntabilitas pemerintah (AKIP) dipengaruhi oleh kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada level Pemerintah Daerah dan perangkat Daerah.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY sebagai Perangkat Daerah sekaligus selaku SKPKD memiliki ketugasan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, memiliki peran sebagai penyaji penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dipersyaratkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dipersyaratkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 agar dapat dilakukan audit untuk memperoleh Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Sebagai Perangkat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset juga diukur keberhasilan tata kelolanya melalui Sasaran Penunjang Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah.

Tabel III. 26 Kontribusi Program BPKA DIY terhadap Capaian Program Pemda

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,77	87,82	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,95	91,75	106,74
		Indeks Kematangan SPBE	3,17	4,53					

Penjelasan

Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah yang diukur dengan indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat dan Kematangan Sistem Pelayanan Elektronik dipengaruhi oleh program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel III. 27 Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran Belanja dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		Efisiensi	
			Target*	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	% Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100%*	100 %	100	937.770.104.822	874.151.252.145	93,22	6,78
2	Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah	Optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah	14.213.383.619*	14.924.078.018	105,00	3.709.701.900	3.382.299.400	91,17	8,83
3.	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A (95)*	A (95,50)	100,53	90.090.056.989	79.527.864.624	88,28	11,72
Jumlah						1.031.569.863.711	957.061.416.169	92,78	7,22
Total Belanja Operasional						1.031.569.863.711	957.061.416.169	92,78	7,22

Sumber: <http://sungguh.jogjaprovo.go.id/>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKA DIY Tahun 2025, Laporan Keuangan BPKA DIY Tahun 2025.

* Berdasarkan Indikator Penyelarasan Kinerja

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian tujuan dan sasaran sebesar Rp1.031.569.863.711,- terealisasi Rp957.061.416.169,- atau 92,78% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

Terdapat efisiensi Rp 74.508.447.542,- atau 7,22% yang bersumber dari :

- Efisiensi pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja cetak
- Efisiensi honorarium TAPD dan narasumber
- Efisiensi makanan dan minuman rapat
- Efisiensi selisih harga pasar (eksternal)

3.4 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain :

- a. Pemanfaatan media sosial dan *google* (misalnya layanan unduhan via *google drive*) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.
- b. Pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi BPKA DIY
- c. Pemanfaatan kanal-kanal pembayaran secara *online*
- d. Pendekatan titik layanan kepada wajib pajak.

3.5 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY sebagaimana *cascading* kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor.

Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2022 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Inventarisasi Lintas Sektor Badan Pengelola Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut :

Tabel III. 28 Inventarisasi Lintas Sektor Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
1.	Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (BPKA, Bapperida, Paniradya Kaistimewan DIY)	Inventarisasi permasalahan, update dan dukungan data, fasilitasi pertemuan, system aplikasi dan pendampingan teknis	Ketepatan Penyusunan APBD dan Perubahan PAPBD	31 OPD	<u>Bagi OPD:</u> 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good government</i>) 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah
		Kemendagri RI	Konsultasi, Komunikasi, Informasi dan Evaluasi			
		Kementerian Keuangan RI	Konsultasi, Komunikasi, Informasi dan Evaluasi			
		Dunia usaha	Masukan permasalahan			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		Perguruan tinggi	Masukan, Isu dan Strategi			<p>Sinergitas Tata kelola Pemerintahan</p> <p>3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset</p> <p>4. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah</p> <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <p>1. Bahan Evaluasi Penyusunan APBD</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas TAPD</p>
		DPRD DIY	Masukan, dan pembahasan, persetujuan, kesepakatan			
		Inspektorat	Reviuw dokumen perencanaan dan penganggaran			
		Masyarakat	Masukan permasalahan			
2.	Penatausahaan Keuangan Daerah	<p>Tim Anggaran Pemerintah Daerah (BPKA, Bapperida, Paniradya, Kaistimewan DIY)</p> <p>Kemendagri RI</p> <p>PT Taspen</p> <p>Bank BPD DIY</p> <p>KPPN dan KPP Pratama</p> <p>BPJS Kesehatan</p>	<p>Inventarisasi permasalahan, update dan dukungan data, fasilitasi rekonsiliasi, Rekapitulasi, kesepakatan, sistem aplikasi dan pendampingan teknis.</p> <p>Konsultasi informasi dan evaluasi, persyaratan pencairan Dana Pusat ke Daerah</p> <p>Kesepakatan dan tindak lanjut kelebihan/kekurangan setoran JKK- JKM</p> <p>Berita Acara Rekonsiliasi Kas Daerah</p> <p>Berita Acara Rekon Pajak Pusat</p>	Akuratisasi penatausahaan keuangan daerah	31 OPD	<p>Bagi OPD:</p> <p>1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good government</i>)</p> <p>2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan</p> <p>3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset</p>

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
			Kesepakatan dan tindak lanjut kelebihan/kekurangan setoran iuran BPJS			<p>4. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah</p> <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <p>1. Bahan Rekapitulasi dan Penyusunan Usulan Gaji Peningkatan Kapasitas TAPD</p>
3.	Pelaporan dan Pertanggung jawaban APBD	<p>Tim Anggaran Pemerintah Daerah (BPKA, Bapperida, Paniradya Kaistimewan DIY)</p> <p>Kemendagri RI, Kemenkeu RI</p> <p>BPK RI</p> <p>Inspektorat/APIP</p> <p>DPRD DIY</p>	<p>Inventarisasi permasalahan, update dan dukungan data, fasilitasi rekonsiliasi, Rekapitulasi, dan pendampingan</p> <p>Konsultasi dan evaluasi, Penilaian/penghargaan</p> <p>Audit/Pemeriksaan LK</p> <p>Reviu Laporan Keuangan</p> <p>Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</p>	Ketepatan penyampaian LKPD dan pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	<p>Bagi OPD:</p> <p>1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good government</i>)</p> <p>2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan</p> <p>3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset</p> <p>4. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah</p>

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
						Bagi Kelompok Sasaran: 1. Bahan evaluasi dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan 2. Peningkatan kinerja TAPD
4.	Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah	Kemendagri RI	Konsultasi dan evaluasi, informasi	Pembinaan pengelolaan keuangan yang konsisten	83 lembaga (5 Pemda Kabupaten/Kota, 3 BUMD, 75 BUKP)	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good government</i>) 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan 3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset 4. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
		Tim Evaluasi APBD kab/Kota	Inventarisasi permasalahan, update dan dukungan data, fasilitasi dan bahan evaluasi/pencermatan			Bagi Kelompok Sasaran: 1. Bahan Tindak lanjut hasil evaluasi 2. Peningkatan kinerja Tim Evaluasi

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		Inspektorat/APIP	Pengawasan internal pemerintah			-
		BLUD	Input dasar pembinaan			-
		Bapperida DIY	Perencanaan Tahunan			-
		Biro Hukum	Kebijakan peraturan perundangan, mekanisme administrasi dan legislasi BUMD			-
5	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (BPKA, Bapperida, Paniradya Kaistimewaan DIY)	Inventarisasi permasalahan, update dan dukungan data, fasilitasi implementasi, rekonsiliasi aplikasi SIPD dan pendampingan teknis	Ketercapaian Pendapatan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah	18 OPD ber pendapatan	<p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good government</i>) 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan 3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset 4. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
		Kepolisian	Ketercapaian pajak dari PKB dan BBNKB			<p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bahan Tindak lanjut

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
						perencanaan pendapatan 4. Peningkatan kinerja petugas pelayanan kesamsatan
		PT Jasa Raharja	Ketercapaian pajak dari PKB dan BBNKB			
		Pertamina	Penetapan target, penghitungan realisasi dan ketercapaian pajak PBBKB			
		Media massa	Publikasi kebijakan			
		Masyarakat	Masukan/sumber pajak daerah			
		Dunia usaha/dealer otomotif	Ketercapaian PAD dari sektor BBNKB			
6.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (BPKA, Bapperida, Paniradya Kaistimewan DIY)	Pencermatan dokumen RKA OPD	Optimalisasi Barang Milik Daerah	31 OPD	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good government</i>) 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan 3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
						4. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Optimalisasi Aset Pemda DIY
		BPK RI	Bahan Pemeriksaan laporan keuangan			
		Dinas Perhubungan	Tim Penilai Independen obyek penindahtanganan BMD			Bagi Kelompok Sasaran: 5. Bahan Tindak lanjut penilaian dan penyusunan RKBMD 6. Peningkatan kinerja Tim Evaluasi
		Dinas PU ESDM	Tim Penilai Independen			
		KPKNL	Pelaksana lelang BMD			
		Bapperida	Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah			
		Inspektorat	Reviu dan Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan BMD			
		Biro Hukum	Legalisasi Pelaksanaan pemanfaatan BMD oleh pihak ketiga			

BAB IV Penutup

Bab IV berisi :

1. Kesimpulan
2. Langkah Perbaikan Kinerja

4.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara garis besar, kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025 telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tujuan “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset yang Transparan dan Akuntabel” di tahun 2025 telah tercapai 100%. Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan indikator Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan telah tercapai sesuai target, yaitu sebesar 100%. Sasaran 2 “Optimalisasi aset Pemda DIY” dengan indikator Optimalisasi Barang Milik Daerah dari target Rp 14.213.383.619,- telah terealisasi sebesar Rp Rp14.924.078.018,- atau telah tercapai sebesar 105,00%. Sasaran 3 “Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah” dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah telah tercapai sebesar 100,53% dari target yang telah ditetapkan.

Dalam upaya untuk mencapai target sasaran yang diharapkan di tahun 2025, terdapat hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

- ❖ Optimalisasi perencanaan dan penganggaran agar semakin selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
- ❖ Optimalisasi pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah masih menghadapi keterbatasan dalam perluasan basis pajak dan retribusi daerah, kepatuhan wajib pajak serta pemanfaatan data dan teknologi informasi secara terpadu
- ❖ Pengelolaan asset daerah masih menghadapi kendala dalam penataan administrasi, pemutakhiran data asset serta optimalisasi pemanfaatan asset agar memberikan nilai tambah dan mendukung pendapatan asli daerah

Faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut :

- Adanya kerjasama dan koordinasi internal maupun koordinasi TAPD dengan Perangkat Daerah Pemda DIY dan stakeholder terkait yang berjalan dengan baik;
- Penguatan kolaborasi dan jejaring kinerja dengan mitra terkait sebagai tindak lanjut regulasi baru, baik dengan Pusat maupun Perangkat Daerah Pemda DIY dan Pemda Kabupaten/Kota;
- Penghapusan Barang Milik Daerah dengan lelang memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga laku terjual dan melebihi nilai perkiraan dari target penjualan.
- Peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia untuk memberikan kinerja terbaik mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan sebagai satu sistem pengelolaan keuangan daerah yang saling mendukung untuk mencapai kinerja keuangan pemerintah terbaik.

4.2. Langkah Perbaikan Kinerja.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

- ✓ Memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran melalui penguatan sinergi antar perangkat daerah, penerapan anggaran berbasis kinerja serta peningkatan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran
- ✓ Mengoptimalkan pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah, peningkatan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak serta penguatan system informasi pendapatan daerah yang terintegrasi dan berbasis digital
- ✓ Penataan dan pengamanan set daerah melalui inventarisasi dan pemutakhiran asset secara berkala, penguatan administrasi asset serta optimalisasi pemanfaatan asset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA					PENJELASAN
						2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100	100	100	100	100	<p>Meta Indikator: Secara kualitatif capaian kinerja sebesar 100% dengan formulasi perhitungan: 1.Meningkatnya PAD (bobot20%) 2. APBD yang tepat waktu dan akurat (bobot20%) 3.Laporan keuangan daerah yang akuntabel (bobot 20%) 4.Penatausahaan keuangan daerah yang akurat (bobot20%) 5.Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (bobot 20%)</p>
			Optimalisasi Aset Pemda DIY	Optimalisasi Barang Milik Daerah	Rupiah	9.016.589.475	9.378.609.475	9.703.109.475	10.003.409.475	10.312.409.475	<p>Meta Indikator: Nilai rupiah optimalisasi Barang Milik Daerah</p>
			Meningkatnya Tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	A	A	A	A	A	<p>Meta Indikator: Nilai Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</p>



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

ꦱꦼꦏꦼꦠꦫꦶꦠꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦴꦏꦠ

Alamat : Kepatihan Danurejan Yogyakarta 55213, Telepon (0274) 562811, Faksimile (0274) 521818
Pos-el: roorganisasi@jogjaprov.go.id, Laman: biroorganisasi.jogjaprov.go.id

**BERITA ACARA RAPAT PENYELARASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR B/00.8.6.3/1652/BR.6**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal Dua Puluh Empat bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Ruang Rapat Radyo Suyoso Lantai 2 Bapperida DIY, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : Fajar Rahmawati, S.Sos., M.P.A.
NIP : 198104062011012007
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
Alamat : Biro Organisasi Setda DIY, Unit 5, Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Biro Organisasi Setda DIY, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

II Nama : Andreas Avelinus Suwanto, S.Psi., M.Si.
NIP : 196911101999031010
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan
Alamat : Bapperida DIY, Komplek Kepatihan Danurejan, Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama Kepala BAPPERIDA DIY selanjutnya disebut Pihak Kedua.

III Nama : Maria Damayanti Handayani, S.E.Ak., M.Acc
NIP : 198110192010012013
Jabatan : Sekretaris
Alamat : BPKA DIY, Komplek Kepatihan Danurejan, Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY selanjutnya disebut Pihak Ketiga.

Sesuai ...

Sesuai dengan hasil pembahasan penyelarasan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga secara bersama-sama telah menyepakati penyelarasan kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program Perangkat Daerah sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara ini;
2. Apabila terhadap substansi pada poin 1 (satu) masih memerlukan tambahan data/penjelasan/keterangan, Pihak Ketiga bersedia melengkapi dan memberikan penjelasan lebih lanjut secara tertulis yang disampaikan selambatnya pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Yogyakarta

Pihak Ketiga,



Maria Damayanti
S.E.Ak.,M.Acc

Pihak Kedua,



H. Andreas Avelinus Suwanto,
S.Psi., M.St.

Pihak Pertama,



Fajar Rahmawati, S.Sos.,
M.P.A.

Mengetahui
Kepala Biro Organisasi,



Ana Windyawati, S.H.,M.H.

Lampiran II.b. Penyeselarasan Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2027

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	2025	2026	2027	Indikator Perjanjian Kinerja	Keterangan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Lampiran II.c. Penyeselarasan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2027

No	Program Perangkat Daerah	Indikator	2025	2026	2027	Indikator Perjanjian Kinerja	Keterangan
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Return on Asset (ROA) BUMD (%)	1,90	2,09	2,27	Ya	Penambahan indikator sebagai hasil penyeselarasan terhadap RPJPD DIY Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Indikator tersebut menjadi indikator yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja, Perangkat Daerah melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja capaian indikator tersebut.

2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	2,77	2,85	2,92	Tidak	Merupakan indikator hasil penyeselarasan terhadap RPJPD DIY Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Indikator tersebut tidak menjadi indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, namun Perangkat Daerah tetap melaporkan ketercapaian indikator tersebut.
---	---------------------------------------	--------------------------------------	------	------	------	-------	---

Pihak Ketiga,

Maria Damayanti
S.E.Ak.,M.Acc

Pihak Kedua,

H., Andreas Avelinus Suwanto, S.Psi., M.Si.

Pihak Pertama,

Fajar Rahmawati, S.Sos., M.P.A.

Mengetahui
Kepala Biro Organisasi,
Ani Windyawati, S.H.,M.H.





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 521818
Website : <http://bpka.jogjapro.go.id> Email : bpka@jogjapro.go.id Kode Pos 55213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wiyos Santoso, S.E., M.Acc.
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hamengku Buwono X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,

Hamengku Buwono X

Pihak Pertama
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset,

Wiyos Santoso, S.E., M.Acc.

PERJANJIAN KINERJA TUJUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel	%	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*)

Keterangan:

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Perjanjian

PERJANJIAN KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	%	100	Triwulan I	25
					Triwulan II	54
					Triwulan III	72
					Triwulan IV	100
2.	Optimalisasi Aset-Aset Pemda DIY	Optimalisasi Barang Milik Daerah	Rupiah	9.703.109.475	Triwulan I	3.429.301.300
					Triwulan II	3.898.312.800
					Triwulan III	8.899.312.800
					Triwulan IV	9.703.109.475
3.	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	A (95,00)	Triwulan I	A(95,00)
					Triwulan II	A(95,00)
					Triwulan III	A(95,00)
					Triwulan IV	A(95,00)*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 3.184.727.350,-
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)	Rp 915.041.617.806,-
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (APBD)	Rp 2.835.394.900,-
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 78.980.637.382,-
	Jumlah Anggaran	Rp 1.000.042.377.438,-

Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 296.671.000,-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 2.019.832.700,-
	Jumlah Anggaran	Rp 2.316.503.700,-

Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 731.571.000,-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 3.676.890.400,-
	Jumlah Anggaran	Rp 4.408.461.400,-

Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 416.345.500,-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 1.873.543.200,-
	Jumlah Anggaran	Rp 2.289.888.700,-

Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kulon Progo

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 408.894.250,-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 2.138.912.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp 2.547.806.250,-

Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Sleman

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 875.651.600,-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 3.601.801.200,-
	Jumlah Anggaran	Rp 4.477.452.800,-

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Pihak Kedua
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,

Hamengku Buwono X

Yogyakarta, 30 Januari 2025
Pihak Pertama
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset,

Wiyos Santoso, S.E., M.Acc.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Yogyakarta

Komplek Kepatihan Danurejan, Yogyakarta Kode Pos 55213 Telepon (0274) 562811
Faksimile (0274)564544 Pos-el: bpkajogjaprov.go.id Laman: <https://www.bpkajogjaprov.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, terkait adanya penetapan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiyos Santoso, S.E., M.Acc.
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hamengku Buwono X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 14 November 2025

Pihak Kedua
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,

Hamengku Buwono X

Pihak Pertama
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset,

Wiyos Santoso, S.E., M.Acc.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TUJUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
 Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan*	Triwulan	Target**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel	%	100*	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100**

Keterangan:

* Target Tahunan berdasarkan Berita Acara Penyelarasan Kinerja

** Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
 Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan*	Triwulan	Target**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	%	100	Triwulan I	25
					Triwulan II	54
					Triwulan III	72
					Triwulan IV	100
2.	Optimalisasi Aset-Aset Pemda DIY	Optimalisasi Barang Milik Daerah	Rupiah	14.213.383.619	Triwulan I	3.429.301.300
					Triwulan II	3.898.312.800
					Triwulan III	8.899.312.800
					Triwulan IV	14.213.383.619
3.	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori	A (95,00)*	Triwulan I	A(95,00)
					Triwulan II	A(95,00)
					Triwulan III	A(95,00)
					Triwulan IV	A(95,00)**

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 2.944.563.500,-
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)	Rp 877.033.925.927,-
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (APBD)	Rp 3.709.701.900,-
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 75.140.911.484,-
	Jumlah Anggaran	Rp 960.173.350.607,-

2. Anggaran yang dikelola Unit Pelaksana Teknis

a. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 280.830.900,-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 1.941.792.800,-
	Jumlah Anggaran	Rp 2.222.623.700,-

b. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 627.884.000,-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 3.675.204.423,-
	Jumlah Anggaran	Rp 4.303.088.423,-

c. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 281.080.500,-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 1.926.235.500,-
	Jumlah Anggaran	Rp 2.207.316.000,-

d. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 397.149.250,-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 2.096.460.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp 2.493.609.250,-

e. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 864.761.600,-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 4.462.670.800,-
	Jumlah Anggaran	Rp 5.327.432.400,-

3. * Target Tahunan berdasarkan Berita Acara Penyelarasan Kinerja.

4. ** Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Pihak Kedua
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,

Hamengku Buwono X

Yogyakarta, 20 November 2025
Pihak Pertama
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset,


Wiyos Santoso, S.E., M.Acc.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

Inspektorat

Alamat: Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Kode Pos 55166 Telepon (0274) 562009
Faksimile (0274) 512567 Pos-el: inspektorat@jogiaprov.go.id Laman: <https://inspektorat.jogiaprov.go.id>

30 Maret 2025

Nomor : *n-1700.1-2.1/465/INS*
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
pada Badan Pengelola Keuangan dan
Aset DIY Tahun 2024

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2024, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

d. Peraturan ... *f*

- d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat;
- e. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 529/KEP/2024 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025;
- f. Surat Tugas Inspektur DIY Nomor 056/III/INSP/2025 Tanggal 03 Maret 2025 untuk melaksanakan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi penguatan pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Melalui Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang ... f

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Sasaran

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2024

6. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

7. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset, tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY adalah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:


- a. penyusunan rencana kerja Badan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi, dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta barang milik daerah;
- c. pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain, serta pendapatan transfer;
- d. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. pengelolaan kas daerah dan akuntansi;

h. pengelolaan...

- h. pengelolaan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan dan tuntutan ganti rugi;
- j. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
- k. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Badan;
- n. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Badan;
- o. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Badan;
- p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- q. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan/atau pengawasan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- r. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum;
- c. Bidang Anggaran Pendapatan, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Pajak Daerah; dan
 - 2) Subbidang Retribusi Daerah.
- d. Bidang Anggaran Belanja, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Anggaran Belanja Pemerintahan; dan
 - 2) Subbidang Anggaran Belanja Perekonomian.
- e. Bidang Pengelola Kas Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Pengelola Kas Pemerintahan; dan
 - 2) Subbidang Pengelola Kas Perekonomian.

f. Bidang... 

- f. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Subbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - 3) Subbidang Bina Administrasi Badan Usaha Milik Daerah.
- g. Bidang Akuntansi, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan; dan
 - 2) Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian.
- h. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
 - 2) Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah.
- i. Unit Pelaksana Teknis; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, secara umum telah terdapat Definisi Operasional atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala;
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut;
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY telah menggunakan aplikasi *SENGGUH* dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja

instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan aplikasi *ASN Memayu* sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

Inovasi yang dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY antara lain:

- Aplikasi untuk menunjang pengelolaan Barang Milik Daerah berupa aplikasi *Persediaan*, aplikasi *Aset Tetap*, dan aplikasi *RKBMD* (*Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*);
- Inovasi layanan yang tanggap terhadap kebutuhan wajib pajak seperti pendekatan titik layanan dan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY telah menindaklanjuti dengan:

- a. Melakukan pengendalian internal secara berjenjang untuk memastikan seluruh program kegiatan telah terlaksana dan berjalan dengan baik untuk mendukung capaian kinerja OPD maupun dalam rangka mendukung sasaran Pemda, serta dalam upaya peningkatan kualitas layanan yang diberikan, melalui penciptaan budaya kerja di lingkungan instansi.
- b. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dengan Pemerintah Pusat, OPD Pemda DIY, DPRD DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka sinergitas perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pemantauan/evaluasi pengelolaan keuangan daerah dalam upaya pencapaian sasaran Pemda.
- c. Terkait rekomendasi agar formulasi pengukuran kinerja (*Penurunan NPL*) dirumuskan secara tepat, pada Tahun 2024 *Penurunan NPL* tidak lagi sebagai parameter kinerja pada meta indikator Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY memperoleh nilai sebesar 90,52. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,73 atau 92,42% dari bobot sebesar 30%;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 27,31 atau 91,02% dari bobot sebesar 30%;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,49 atau 89,90% dari bobot sebesar 15%;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 22,00 atau 88% dari bobot sebesar 25%.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY agar:

- a. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Perencanaan Kinerja guna memastikan bahwa setiap meta indikator kinerja telah dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan yang jelas;
- b. Meningkatkan pengendalian terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja menampilkan informasi yang akurat mengenai capaian kinerja yang telah diperjanjikan;
- c. Meningkatkan keselarasan penyampaian laporan kinerja pada aplikasi Sungguh dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani.

C. PENUTUP... f

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY memperoleh nilai 90,52. Nilai tersebut masuk dalam kategori AA dengan interpretasi Sangat Memuaskan.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY diharapkan dapat mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc.

Tembusan:

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 Kepatihan Danurejan Yogyakarta Kode Pos 55213 Telepon (0274) 562811 Ext. 1117
 Faksimile (0274) 564544 Pos-el: bpka@joglaprov.go.id Laman: bpka.joglaprov.go.id

**TANGGAPAN ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI
 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
 Tahun 2024**

Berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Surat Nomor R/700.1.2.1/465/INS tanggal 20 Maret 2025, Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa Tindakan lanjut yang dilakukan atas rekomendasi LHE AKIP sebagai berikut :

No	Saran/rekomendasi LHE AKIP	Tindak Lanjut
1.	Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Perencanaan Kinerja guna memastikan bahwa setiap meta indikator kinerja telah dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan yang jelas.	Berkomitmen melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Perencanaan Kinerja guna memastikan bahwa setiap meta indikator kinerja telah dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan yang jelas.
2.	Meningkatkan pengendalian terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja menampilkan informasi yang akurat mengenai capaian kinerja yang telah diperjanjikan.	Berkomitmen meningkatkan pengendalian terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja menampilkan informasi yang akurat mengenai capaian kinerja yang telah diperjanjikan.
3.	Meningkatkan keselarasan penyampaian laporan kinerja pada aplikasi Sengguh dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani.	Berkomitmen meningkatkan keselarasan penyampaian laporan kinerja pada aplikasi Sengguh dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani.


 Wiyos Santoso, S.E., M.Acc



DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ꦢꦫꦺꦗꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Nomor : B/400.10.8.1/280/BR.6 13 Februari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025

Yth. Inspektur / Paniradya Pati / Sekretaris DPRD / Kepala Badan / Kepala Dinas / Kepala Satpol PP / Kepala Pelaksana BPBD / Kepala Biro di lingkungan Pemerintah Daerah DIY

Kami sampaikan dengan hormat, Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY telah melaksanakan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 dan pembahasan sanggah atas Hasil Sementara Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 yang menghasilkan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 menjadi capaian kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 (terlampir). Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 setiap Perangkat Daerah dapat diunduh melalui tautan <https://linktr.ee/prbdiy> (folder hasil evaluasi RB OPD 2025) atau pada tautan bit.ly/hasilervbpdfinal2025.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
Sekretaris Daerah,



Ni Made Dwipanti Indrayanti, S.T., M.T.

Lampiran Surat
 Nomor : B/400.10.8.1/280/BR.6
 Tanggal : 13 Februari 2026

HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

No	Unit Kerja	Nilai Total RB General 2024	Nilai Total RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	Nilai Total RB General 2025	Nilai Total RB Tematik 2025	INDEKS RB 2025	Kategori	Predikat	Target Nilai Indeks RB OPD 2025	GAP (target nilai - indeks RB OPD)	Keterangan
1	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	86,95	8,92	95,87	87,14	8,77	95,90	A	Memuaskan	95,88	0,02	Sudah mencapai target RB OPD
2	Biro Hukum Setda DIY	84,28	5,85	90,13	84,08	6,83	90,91	A	Memuaskan	90,15	0,76	Sudah mencapai target RB OPD
3	Biro Organisasi Setda DIY	87,57	9,06	96,63	86,61	10,10	96,71	A	Memuaskan	96,7	0,01	Sudah mencapai target RB OPD
4	Biro Umum dan Protokol Setda DIY	83,26	5,18	88,44	86,15	5,73	91,88	A	Memuaskan	88,45	3,43	Sudah mencapai target RB OPD
5	Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY	83,51	10,23	93,74	85,41	12,67	98,08	A	Memuaskan	93,75	4,33	Sudah mencapai target RB OPD
6	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan	86,6	6,88	93,48	84,31	7,65	91,96	A	Memuaskan	93,49	-1,53	Belum mencapai target RB OPD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Unit Kerja	Nilai Total RB General 2024	Nilai Total RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	Nilai Total RB General 2025	Nilai Total RB Tematik 2025	INDEKS RB 2025	Kategori	Predikat	Target Nilai Indeks RB OPD 2025	GAP (target nilai - indeks RB OPD)	Keterangan
	Pembiayaan Pembangunan Setda DIY											Nilai RB General kurang maksimal pada indikator : 1.Tingkat Implementasi Pembangunan RB General di Perangkat Daerah (-1,67)* 2.Kualitas Perencanaan Program Kegiatan Perangkat Daerah (-0,03)* (terjadi di seluruh OPD) 3.Tingkat Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah (-0,27)* 4.Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa (-0,01)* 5.Akselerasi Penerapan Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Unit Kerja	Nilai Total RB General 2024	Nilai Total RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	Nilai Total RB General 2025	Nilai Total RB Tematik 2025	INDEKS RB 2025	Kategori	Predikat	Target Nilai Indeks RB OPD 2025	GAP (target nilai - indeks RB OPD)	Keterangan
												Digital di Perangkat Daerah (-2,02)* 6.Tingkat Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (-0,77)* 7.Indeks BerAKHLAK Perangkat Daerah (-0,18)* Nilai RB Tematik kurang maksimal pada tematik : 1.Peningkatan Investasi (-0,42)* *perhitungan bobot nilai (jika membandingkan capaian tahun 2025 dengan tahun 2024)
7	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	83,78	8,29	92,07	82,23	11,05	93,28	A	Memuaskan	92,08	1,2	Sudah mencapai target RB OPD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Unit Kerja	Nilai Total RB General 2024	Nilai Total RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	Nilai Total RB General 2025	Nilai Total RB Tematik 2025	INDEKS RB 2025	Kategori	Predikat	Target Nilai Indeks RB OPD 2025	GAP (target nilai - indeks RB OPD)	Keterangan
8	Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda DIY	n/a	n/a	n/a	85,25	7,39	92,64	A	Memuaskan	92,61	0,03	Sudah mencapai target RB OPD
9	Paniradya Kaistimewan	84,31	9,68	93,99	85,47	10,99	96,46	A	Memuaskan	94	2,46	Sudah mencapai target RB OPD
10	Sekretariat DPRD DIY	83,65	5,11	88,76	83,78	5,96	89,74	A	Memuaskan	88,76	0,98	Sudah mencapai target RB OPD
11	Inspektorat DIY	89,25	6,99	96,24	88,75	9,42	98,17	A	Memuaskan	96,24	1,93	Sudah mencapai target RB OPD
12	Dinas Pariwisata DIY	84,64	8,51	93,15	86,27	9,75	96,02	A	Memuaskan	93,15	2,87	Sudah mencapai target RB OPD
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	86,95	12,05	99	87,94	13,06	101	AA	Sangat Memuaskan	99,03	1,97	Sudah mencapai target RB OPD
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	84,07	11,4	95,47	82,98	14,46	97,44	A	Memuaskan	95,48	1,96	Sudah mencapai target RB OPD
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	85,45	12	97,45	84,21	15,7	99,91	A	Memuaskan	97,46	2,45	Sudah mencapai target RB OPD
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	84,94	7,61	92,55	85,92	12,81	98,73	A	Memuaskan	92,56	6,17	Sudah mencapai target RB OPD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Unit Kerja	Nilai Total RB General 2024	Nilai Total RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	Nilai Total RB General 2025	Nilai Total RB Tematik 2025	INDEKS RB 2025	Kategori	Predikat	Target Nilai Indeks RB OPD 2025	GAP (target nilai - indeks RB OPD)	Keterangan
17	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	85,22	11,94	97,16	83,41	16,34	99,75	A	Memuaskan	97,17	2,58	Sudah mencapai target RB OPD
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	85,47	8,46	93,93	85,16	11,41	96,57	A	Memuaskan	93,94	2,63	Sudah mencapai target RB OPD
19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	83,49	12,39	95,88	83,02	15,81	98,83	A	Memuaskan	95,89	2,94	Sudah mencapai target RB OPD
20	Dinas Perhubungan DIY	82,98	7,19	90,17	83,96	12,24	96,2	A	Memuaskan	90,18	6,02	Sudah mencapai target RB OPD
21	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana) DIY	83,26	7,38	90,64	84,63	11,69	96,32	A	Memuaskan	91,14	5,18	Sudah mencapai target RB OPD
22	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	86,94	12,54	99,48	87,15	13,27	100,42	AA	Sangat Memuaskan	99,48	0,94	Sudah mencapai target RB OPD
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	85,06	7,55	92,61	85,06	11,44	96,5	A	Memuaskan	92,63	3,87	Sudah mencapai target RB OPD

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Unit Kerja	Nilai Total RB General 2024	Nilai Total RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	Nilai Total RB General 2025	Nilai Total RB Tematik 2025	INDEKS RB 2025	Kategori	Predikat	Target Nilai Indeks RB OPD 2025	GAP (target nilai - indeks RB OPD)	Keterangan
	Terpadu Satu Pintu DIY											
24	Dinas Kesehatan DIY	87,83	9,64	97,47	85,44	15,09	100,53	AA	Sangat Memuaskan	97,48	3,05	Sudah mencapai target RB OPD
25	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	82,52	9,94	92,46	85,45	13,73	99,18	A	Memuaskan	92,47	6,71	Sudah mencapai target RB OPD
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	89,36	6,94	96,3	88,32	10,42	98,74	A	Memuaskan	96,31	2,43	Sudah mencapai target RB OPD
27	Dinas Sosial DIY	86,52	8,74	95,26	86,9	13,56	100,46	AA	Sangat Memuaskan	95,27	5,19	Sudah mencapai target RB OPD
28	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	82,61	6,29	88,9	83	10,32	93,32	A	Memuaskan	88,91	4,41	Sudah mencapai target RB OPD
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY	85,13	9,11	94,24	85,77	12,01	97,78	A	Memuaskan	94,25	3,53	Sudah mencapai target RB OPD
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat,	n/a	n/a	n/a	83,08	12,03	95,11	A	Memuaskan	88,65	6,46	Sudah mencapai target RB OPD

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Unit Kerja	Nilai Total RB General 2024	Nilai Total RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	Nilai Total RB General 2025	Nilai Total RB Tematik 2025	INDEKS RB 2025	Kategori	Predikat	Target Nilai Indeks RB OPD 2025	GAP (target nilai - indeks RB OPD)	Keterangan
	Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY											
31	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	80,52	4,55	85,07	81,37	8,76	90,13	A	Memuaskan	87,07	3,06	Sudah mencapai target RB OPD
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah DIY	88,83	10,25	99,08	86,64	12,86	99,5	A	Memuaskan	99,09	0,41	Sudah mencapai target RB OPD
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	87,67	7,22	94,89	85,79	9,72	95,50	A	Memuaskan	95	0,50	Sudah mencapai target RB OPD
34	Badan Kepegawalan Daerah DIY	89,65	7,04	96,69	88,12	9,46	97,58	A	Memuaskan	96,7	0,88	Sudah mencapai target RB OPD
35	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	88,09	8,04	96,13	86,37	10,48	96,85	A	Memuaskan	96,14	0,71	Sudah mencapai target RB OPD
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	85,71	5,65	91,36	85,46	8,51	93,97	A	Memuaskan	91,37	2,6	Sudah mencapai target RB OPD
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	80,83	6,33	87,16	82	7,97	89,96	A	Memuaskan	87,26	2,70	Sudah mencapai target RB OPD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Sber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Unit Kerja	Nilai Total RB General 2024	Nilai Total RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	Nilai Total RB General 2025	Nilai Total RB Tematik 2025	INDEKS RB 2025	Kategori	Predikat	Target Nilai Indeks RB OPD 2025	GAP (target nilai - indeks RB OPD)	Keterangan
38	Badan Penghubung Daerah DIY	84,3	4,13	88,43	81,41	7,82	89,23	A	Memuaskan	88,55	0,68	Sudah mencapai target RB OPD
	Rata-Rata	85,31	8,31	93,62	85,11	10,98	96,09					

Keterangan Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi :

Nilai/Angka Indeks	Kategori	Predikat
>100 - 120	AA	Sangat Memuaskan
>80 - 100	A / A-	Memuaskan/Memuaskan dengan Catatan
>70 - 80	BB	Sangat Baik
>60 - 70	B	Baik
>50 - 60	CC	Cukup
>30 - 50	C	Kurang
0 - 30	D	Sangat Kurang








a.n. Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
Sekretaris Daerah,



Ni Made Dwipanti Indrayanti, S.T., M.T.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Sber dan Sandi Negara (BSSN).

Penghargaan Yang Diperoleh Pada Tahun 2025

No.	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TINGKATAN/ JUARA KE-	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM
1.	Penghargaan atas Komitmen dan Kontribusi Nyata dalam Pelaksanaan Piloting Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan	Pemda DIY	-	
2.	Badan Publik Informatif Kategori Pemda DIY	Komisi Informasi Daerah DIY	Informatif	
3	TP2DD Provinsi terbaik III Wilayah Jawa Bali 2025	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Peringkat III	
4	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 50 (Lima Puluh) Inovasi Terbaik Kategori Pemerintah Daerah DIY	Gubernur DIY	SAMOLI pada KPPD DIY di Kota Yogyakarta)	
5	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 50 (Lima Puluh) Inovasi Terbaik Kategori Pemerintah Daerah DIY	Gubernur DIY	SALIMAN pada KPPD DIY di Kabupaten Gunung Kidul	
6	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 50 (Lima Puluh) Inovasi Terbaik Kategori Pemerintah Daerah DIY	Gubernur DIY	INFOSAKU pada KPPD DIY di Kabupaten Sleman	
7	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 50 (Lima Puluh) Inovasi Terbaik Kategori Pemerintah Daerah DIY	Gubernur DIY	SIPOJAK pada KPPD DIY di Kabupaten Sleman	



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**